



MEDIA INFORMASI PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



**LAUT MERDEKA
NELAYAN SEJAHTERA**

Sahabat PSDKP yang Tangguh!

Berada di kawasan *Ring of Fire* dan beriklim tropis, Indonesia hidup berdampingan dengan potensi berbagai bencana alam. Gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kekeringan menjadi bagian dari tantangan negeri kepulauan ini. Dalam situasi penuh ketidakpastian, ketangguhan bukan sekadar kemampuan bertahan menghadapi ancaman, tetapi juga kemampuan menjaga sumber kehidupan, melindungi masyarakat, dan memastikan laut tetap memberi manfaat bagi semua.

Inilah benang merah ORCA Edisi Juli-Agustus 2026: ketangguhan menjaga laut, melindungi masyarakat, dan menghadirkan manfaat di tengah berbagai tantangan. Nyala optimisme itu tercermin dalam kerja-kerja besar Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP). Dari pesisir Konawe melalui semangat kemerdekaan di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Sorue Jaya, geliat ekspor perikanan, pembangunan infrastruktur pengawasan di Manado dan Batam, hingga kepedulian kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur.

Namun, menjaga laut bukan semata-mata tentang kapal patroli, operasi pengawasan, dan penegakan hukum. Ketangguhan juga hadir melalui kecepatan merespons kebutuhan masyarakat. Di sinilah Call Center PSDKP memiliki arti strategis. Ia menjadi salah satu jembatan komunikasi antara masyarakat dan institusi pengawasan, ruang untuk menyampaikan informasi, pengaduan, maupun laporan yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut.

Semangat yang sama terlihat dalam penanganan dan penyelamatan kapal. Ketika sebuah kapal menghadapi persoalan di laut, kehadiran negara tidak hanya dimaknai melalui aspek hukum, tetapi juga melalui upaya mencari solusi, memberikan kepastian, dan mendorong penyelesaian yang aman serta konstruktif. Penanganan kapal kandas melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi salah satu gambaran bahwa pengawasan dapat berjalan berdampingan dengan pendekatan dialog, mediasi, dan penyelesaian masalah yang berkeadilan.

Semua itu menegaskan bahwa pengabdian Ditjen PSDKP tidak berhenti pada pengawasan dan penegakan hukum. Ia hadir dalam pelayanan, penyelamatan, pembangunan,



pemberdayaan, dan kemanusiaan. Laut yang aman membutuhkan institusi yang responsif; laut yang berdaulat membutuhkan aparatur yang profesional; sementara laut yang memberi manfaat membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Ketangguhan itu tentu membutuhkan manusia yang tangguh. Sebanyak 460 peserta Diklat Dasar Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Asisten Pengawas Perikanan Tahun 2026 dipersiapkan dengan kompetensi, keberanian, profesionalisme, dan integritas untuk menjadi penjaga laut masa depan. Mereka adalah bagian dari investasi sumber daya manusia yang akan menentukan seberapa kuat negara hadir di laut.

Menjaga laut adalah menjaga kehidupan, dan menjaga kehidupan adalah menghadirkan masa depan. Di tengah berbagai ancaman dan ketidakpastian, Ditjen PSDKP terus bergerak memastikan laut Indonesia tetap **aman, sehat, berdaulat, dan memberikan manfaat** bagi masyarakat serta generasi mendatang.

Selamat membaca. Semoga setiap lembar dalam edisi ini memantik inspirasi, memelihara optimisme, dan menyalakan api pengabdian untuk menjaga laut Indonesia tetap **merdeka, berdaya, lestari, dan berwibawa**—hari ini, esok, dan untuk generasi yang akan datang.

Selamat Membaca!

4	FOKUS UTAMA Laut Merdeka, Nelayan Sejahtera	71	Seluruh UPT PSDKP Sambut Bulan Merdeka dengan Ragam Kegiatan
6	KILAS KENERJA Dari Konawe Untuk Negeri, Merah Putih di Tengah Bahari	74	KILAS UPT Garda Pesisir Karangjaladri: Menjaga Laut, Menopang Ekonomi Biru
12	KKP Tanggap Bencana, Salurkan 50 Ton Bantuan Logistik Untuk NTT	76	Perkuat Pengawasan Pesisir, PSDKP Tarakan Bina Pokmaswas Bunyu Selatan
15	Indonesia Perkuat Hukum Maritim Bersama Tiga Negara di RPOA-IUU	78	Dedikasi UPT PSDKP Cilacap Menjaga Kedaulatan Laut Nusantara
17	Diklat Pengawas Perikanan 2026: Menjaga Laut, Merawat Masa Depan	80	LEADERSHIP INSIGHT Fokus Pada Tujuan, Bukan Pada Hambatan
20	KKP Tindak Pemanfaatan 271 Ekor Arwana dilindungi Tanpa Izin di Riau	82	SOSOK Sumono Darwinto: Memimpin Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dengan Ketegasan, Pengalaman, dan Keteladanan
23	Gedung Baru, Energi Baru Perkuat Benteng Pengawasan Laut Sulawesi Utara	88	PERSPEKTIF Menabur
25	Gerak Nyata Dharma Wanita Ditjen PSDKP Untuk Generasi Masa Depan	90	LENSA PSDKP
27	Kapal Kandas, Sengketa Tuntas: Penyelesaian Kerusakan Terumbu Karang LCT Reymond Melalui Jalur Nonlitigasi		
30	Menjaga Air Laut, Menjaga Ekosistem		
32	PSDKP dan Bareskrim Polri Perkuat Sinergi Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan		
35	PSDKP Smart Chapter 13: Mengubah Setiap Detik Patroli Menjadi Cerita Inspiratif Publik		
37	Menjaga Jenis Ikan Dilindungi, Memutus Rantai Perdagangan Ilegal Bukan Sekadar Melindungi Spesies, Tetapi Menjaga Keseimbangan Laut		
40	Stop Bom Ikan, Jangan Jadi Bumerang		
42	KKP Tangkap Kapal Terduga Komplotan Pelaku Bom Ikan di Kepulauan Spermonde		
46	Tujuh Hari Menembus Badai, Kp. ORCA 01 dan Kp. ORCA 05 Selamatkan Dua Kapal di Samudra Pasifik		
48	Dimana Ada Nelayan, Disitu Pasti Ada PSDKP		
50	Bukan Sekadar Mengawasi, VMS PSDKP Jadi Mata Penolong Nelayan di Laut		
54	KKP Bangun 10 Kapal Pengawas Untuk Perkuat Laut Natuna Utara		
56	Coaching Clinic Menembak di Batam dan Manado: Menajamkan Bidikan, Meneguhkan Pengabdian		
58	Viral Dijual, KKP Turun Tangan. Kegiatan di Menjangan Kecil Dihentikan Sementara		
60	Kolaborasi Ditjen PSDKP dengan Lima Pemerintah Daerah		
65	Penguatan Prasarana Pengawasan di Wilayah Rawan IUU Fishing		
68	Peran Krusial Call Center PSDKP		



MEDIA INFORMASI PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENGARAH :

Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., MM
Direktur Jenderal PSDKP

Sekretaris Ditjen PSDKP
Direktur Pengendalian Operasi Armada
Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan
Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan
Direktur Penanganan Pelanggaran
Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan

REDAKTUR :

Airlangga, Nur Asiyah,
Rochman Nurhakim,
Annis Susanti, Hadi Purwanto,
Febri Firmansyah Sudjatmoko,
Nur Rakhma Novika, Tifa Auliani,
Handi Darma Saputra, Kris Andieka,
Oko Marisno, M. Natsir Amir,
Bastian Ragas.

PRODUKSI :

Tim Kerja Humas
Direktorat Jenderal PSDKP

ALAMAT REDAKSI:

DIREKTORAT JENDERAL PSDKP-KKP
GEDUNG MINA BAHARI IV LANTAI 14.
JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16, JAKARTA 10110
Email: humaspsdkp@kkp.go.id



Laut Merdeka, Nelayan Sejahtera

Jauh sebelum istilah “poros maritim” menjadi wacana modern, Nusantara telah menjadikan laut sebagai jalan raya peradaban. Pada abad ke-14, samudera bukan sekadar bentangan air yang memisahkan pulau, melainkan ruang perdagangan, diplomasi, pertahanan, dan proyeksi kekuasaan. Di atas gelombang itulah Jung, kapal-kapal besar Nusantara, mengarungi samudera sebagai simbol kemampuan teknologi dan kekuatan bahari.

Di balik kejayaan maritim Majapahit, sejarah dan tradisi populer mengenal sosok Mpu Lembu Nala sebagai salah satu tokoh yang dikaitkan dengan kekuatan militer dan maritim Majapahit pada masa Hayam Wuruk. Sosoknya kerap ditempatkan dalam konteks kejayaan Majapahit dan cita-cita penyatuan Nusantara yang kemudian sangat lekat dengan Mahapatih Gajah Mada. Dalam konteks kejayaan maritim Majapahit, Lembu Nala tidak hanya dipandang sebagai seorang panglima, tetapi juga sebagai

representasi pentingnya kekuatan laut bagi sebuah kerajaan kepulauan di mana penguasaan jalur pelayaran dan ruang laut menjadi bagian strategis dalam menopang kekuasaan dan konektivitas antardaerah. .

Bagi Lembu Nala, sebagaimana tergambar dalam tradisi sejarah tentang kekuatan maritim Majapahit, “Jung Jawa” bukan sekadar sarana transportasi. Sebutan untuk kapal besar yang dalam berbagai sumber sejarah dan tradisi dikaitkan dengan kekuatan maritim Jawa pada masa Majapahit itu merupakan bagian dari instrumen kekuatan, diplomasi, dan kehadiran kerajaan di laut. Armada menjadi salah satu cara untuk memastikan kewibawaan Majapahit menjangkau ruang-ruang maritim Nusantara. Salah satu senjata andalan di kapal Jung Jawa adalah “Cetbang” yang merupakan meriam atau senjata artileri berbasis bubuk mesiu yang digunakan di Nusantara pada masa kerajaan-kerajaan Jawa, dan sering dikaitkan dengan Majapahit sekitar abad ke-14-15. Dalam

konteks Majapahit, Cetbang menarik karena menunjukkan bahwa kekuatan maritim tidak hanya mengandalkan kapal dan jumlah armada, tetapi juga mulai memanfaatkan teknologi persenjataan berbasis mesiu.

Hal ini membuktikan bahwa laut tidak sekadar dipandang sebagai ruang yang menunggu untuk dimanfaatkan. Ia merupakan ruang strategis yang harus dipahami, dijaga, dan dikelola dengan strategi, keberanian, serta kemampuan teknologi pelayaran.

Berabad-abad kemudian, semangat itu hadir dalam wajah yang berbeda.

Jung Jawa berganti kapal-kapal pengawas yang membelah gelombang. Cetbang berganti teknologi pemantauan, sistem informasi, komunikasi, dan penegakan hukum. Namun satu hal tidak berubah: negara harus hadir di lautnya sendiri.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M., mengajak insan PSDKP untuk memaknai kembali spirit Sang Laksamana Penakluk Ombak, Mpu Lembu Nala. Bukan dalam pengertian menaklukkan negeri lain, melainkan menaklukkan tantangan untuk memastikan laut tetap berdaulat, sumber dayanya terlindungi, dan masyarakat pesisir memperoleh manfaat yang adil.

Jika Lembu Nala menjadikan armada sebagai instrumen kehadiran Majapahit di lautan, maka PSDKP menempatkan pengawasan sebagai instrumen kehadiran negara.

Patroli menjadi mata negara di tengah keluasan samudera. Penegakan hukum menjadi pagar bagi sumber daya yang rentan dijarah. Teknologi menjadi perpanjangan penglihatan untuk mendeteksi aktivitas di laut. Sementara masyarakat pesisir ditempatkan bukan sebagai objek, melainkan mitra dalam menjaga ruang hidup bersama.

Di sinilah filosofi “Laut Merdeka, Nelayan Sejahtera” menemukan maknanya.

Laut merdeka bukan laut tanpa aturan. Laut merdeka adalah laut yang terlindungi dari *illegal fishing*, penjarahan, eksploitasi destruktif, dan aktivitas yang mengancam keberlanjutan sumber daya. Laut merdeka adalah ruang tempat nelayan yang taat hukum dapat melaut dengan



aman dan memperoleh manfaat dari kekayaan laut bangsanya.

Sebab, apa arti kedaulatan jika nelayan kehilangan ruang tangkap? Apa arti kekayaan laut jika ikan semakin sulit ditemukan? Dan apa arti armada pengawasan jika ekosistem yang dijaga tidak lagi mampu menopang kehidupan?

Karena itu, tugas “laksamana” masa kini bukan sekadar menaklukkan ombak, tetapi memastikan ombak tetap membawa kehidupan.

Semangat tersebut diwujudkan melalui penguatan POKMASWAS sebagai mata dan telinga masyarakat, PSDKP Mengajar dan PSDKP Goes to Campus sebagai jembatan kesadaran bahari generasi muda, PSDKP Smart sebagai kekuatan teknologi pengawasan, serta Jam Pimpinan untuk membangun organisasi yang disiplin, solid, dan berintegritas.

Jika Lembu Nala dahulu membutuhkan kapal, strategi, keberanian, dan visi, maka pengawasan laut Indonesia hari ini membutuhkan lebih dari itu: teknologi, kolaborasi, penegakan hukum, partisipasi masyarakat, dan keberpihakan pada keberlanjutan.

Maka, Sang Laksamana Penakluk Ombak bukan kisah tentang menaklukkan laut. Ia adalah kisah tentang menaklukkan tantangan demi menjaga laut tetap hidup.

Dari Jung yang dahulu mengarungi samudera hingga kapal pengawas yang kini menjaga perairan negeri, semangatnya tetap sama: laut adalah kehormatan bangsa yang harus dijaga.

Sebab ukuran seorang laksamana bukanlah seberapa jauh ia membawa armadanya mengarungi lautan, melainkan seberapa lama ia mampu memastikan laut tetap menjadi sumber kehidupan bagi bangsanya.

Laut Merdeka. Nelayan Sejahtera. Indonesia Berdaulat.



Dari Konawe Untuk Negeri, Merah Putih Di Tengah Bahari

Delapan ratus personel, sembilan Kapal Pengawas, dan 300 kapal nelayan menjadi saksi ketika peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia digelar di tengah masyarakat pesisir Konawe. Dari Teluk Sorue, Merah Putih berkibar membawa pesan tentang negara yang hadir, nelayan yang berdaya, dan laut yang terjaga.

Pagi itu, laut Sorue Jaya seperti ikut merayakan kemerdekaan.

Di antara deretan kapal nelayan yang berhias Merah Putih, suara komando menggema dari Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Sorue Jaya, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Angin pesisir mengibarkan bendera-bendera merah putih, sementara ratusan peserta berdiri

dalam satu barisan, menyatukan semangat kebangsaan dengan harapan masyarakat pesisir akan masa depan yang lebih sejahtera.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di tempat ini terasa lebih dari sekadar seremoni. Ia menjadi gambaran tentang bagaimana kemerdekaan diterjemahkan dalam kehidupan masyarakat pesisir ketika negara hadir bukan hanya melalui upacara, tetapi juga melalui pembangunan, pemberdayaan, dan pengawasan laut.

Di tengah masyarakat yang hidupnya bertumpu pada laut, Merah Putih membawa pesan sederhana namun kuat: kemerdekaan harus sampai ke dermaga, ke kapal-kapal nelayan, hingga ke ruang tempat masyarakat pesisir menggantungkan harapan.

Menteri Menjadi Inspektur, PSDKP Menjadi Garda

Suasana khidmat semakin terasa ketika Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Berdiri di tengah Kampung Nelayan Merah Putih, Menteri mengenakan pakaian adat tradisional Konawe. Pilihan busana tersebut bukan sekadar penghormatan terhadap budaya lokal, tetapi juga menjadi simbol bahwa pembangunan kelautan dan perikanan harus tumbuh bersama masyarakat dan berakar pada kearifan daerah.

Dari tempat ini, pesan pembangunan terasa semakin nyata. Pemerintah memilih hadir di tengah masyarakat nelayan—mereka yang setiap hari berhadapan dengan gelombang, cuaca, dan ketidakpastian laut untuk menyediakan pangan bagi bangsa.

Sementara itu, di bawah komando Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Dr. Pung Nugroho Saksono, selaku Komandan Upacara, barisan pasukan berdiri tegap.

Dua peran tersebut menghadirkan satu pesan yang saling melengkapi: pembangunan memberikan ruang tumbuh bagi masyarakat, sementara pengawasan memastikan ruang tersebut tetap aman, tertib, dan berkelanjutan.



Di darat, negara hadir melalui kebijakan dan pembangunan. Di laut, negara hadir melalui kapal-kapal pengawas dan personel PSDKP yang memastikan kekayaan laut Indonesia tetap berada dalam kedaulatan dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab.

Delapan Ratus Personel dalam Satu Barisan

Pemandangan pagi itu semakin istimewa ketika 17 taruna dan taruni terbaik Ocean Institute of Indonesia Kampus Bitung dipercaya menjadi Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih.

Langkah tegap mereka mengiringi Sang Merah Putih menuju puncak tiang. Di hadapan laut Konawe, generasi muda kelautan tersebut menjadi bagian dari sebuah momen yang mempertemukan semangat kemerdekaan





dengan masa depan Indonesia sebagai negara maritim.

Di belakang mereka, kekuatan besar sektor kelautan dan perikanan berdiri dalam satu barisan.

Sebanyak 800 personel mengikuti upacara. Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari Kepala UPT lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Awak Kapal Negara pada Kapal Pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pengawas Perikanan, Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K), hingga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang kelautan dan perikanan.

Barisan tersebut diperkuat perwakilan UPT lingkup KKP, yakni Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kendari, serta Penyuluh Perikanan BPPSDMKP.

Turut bergabung pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, serta para nelayan Kabupaten Konawe.

Seragam boleh berbeda. Tugas dan kewenangan boleh beragam. Namun pagi itu semuanya berdiri menghadap Merah Putih yang sama.

Sembilan Penjaga Laut di Teluk Sorue

Pemandangan tak kalah kuat tersaji di perairan. Di Teluk Sorue, sembilan armada Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan berjajar gagah. Kapal-kapal tersebut menjadi representasi kehadiran negara di laut sekaligus simbol ketangguhan dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.

Armada itu terdiri atas KP Orca 01, KP Orca 04, KP Orca 05, KP Orca 06, KP Paus 01, KP Hiu Macan Tutul 01, KP Hiu 13, KP Hiu 14, dan KP Hiu 15.

Pada hari-hari biasa, kapal-kapal tersebut mengarungi perairan Indonesia untuk melaksanakan pengawasan dan menghadapi berbagai ancaman terhadap kekayaan laut. Pada hari kemerdekaan, mereka berdiri gagah di Teluk Sorue, menjadi bagian dari upacara yang mengingatkan bahwa kemerdekaan juga harus dijaga di wilayah laut.

Jika dahulu perjuangan kemerdekaan dilakukan untuk membebaskan bangsa dari penjajahan, maka hari ini perjuangan diteruskan dengan menjaga kedaulatan dan kekayaan laut agar manfaatnya tetap dinikmati sebesar-besarnya oleh bangsa Indonesia.

Tiga Ratus Kapal, Satu Lautan Merah Putih

Di antara armada pengawas tersebut, hadir kekuatan lain yang menjadi jantung kehidupan pesisir: 300 kapal nelayan Kabupaten Konawe.

Ratusan kapal dihiasi bendera dan pernik kemerdekaan, mengubah perairan Sorue menjadi lautan Merah Putih. Kapal-kapal yang sehari-hari digunakan untuk mencari nafkah menjelma menjadi bagian dari panggung besar kebangsaan.

Pemandangan itu menghadirkan simbol yang kuat.

Di satu sisi berdiri Kapal Pengawas sebagai representasi negara yang menjaga laut. Di sisi lainnya berlayar kapal-kapal nelayan sebagai representasi masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada laut.

Yang satu menjaga, yang lain menghidupi. Keduanya dipertemukan oleh laut yang sama dan Merah Putih yang sama.

Di Sorue Jaya, nasionalisme tidak hanya diucapkan melalui pidato. Ia hadir dalam barisan 800 personel, langkah tegap 17 taruna dan taruni, sembilan Kapal Pengawas yang berjajar di Teluk Sorue, serta ratusan kapal nelayan yang memenuhi cakrawala.

Dari Dermaga Menuju Pasar

Di tempat yang sama, kerja besar Kementerian Kelautan dan Perikanan diwujudkan melalui



pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih dan pembentukan Koperasi Nelayan Merah Putih.

Berbagai fasilitas dibangun untuk memperkuat mata rantai usaha perikanan. Bukan hanya tempat berlabuh dan mendaratkan ikan, tetapi sebuah ekosistem ekonomi yang menghubungkan nelayan dengan fasilitas penyimpanan, penanganan hasil tangkapan, hingga distribusi.

Cold storage memegang peranan penting dalam menjaga mutu dan kesegaran hasil tangkapan sehingga nilai jual ikan dapat dipertahankan. Penanganan bahkan dilakukan sejak ikan didaratkan melalui dukungan pabrik es portabel yang membantu menjaga suhu ikan secara konsisten.





Seluruh mata rantai tersebut kemudian terhubung melalui dermaga terpadu yang mendukung aktivitas bongkar muat, memperkuat konektivitas distribusi, dan memperlancar logistik hasil perikanan.

Semua fasilitas itu pada akhirnya bermuara pada satu tujuan: meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan dan memperluas akses nelayan terhadap pasar.

Delapan Ton yang Membawa Harapan

Transformasi tersebut bukan sekadar konsep. Meski masih memasuki tahap uji coba operasional, KNMP Sorue Jaya telah mencatat capaian yang memberi optimisme. Sebanyak 8 ton ikan berkualitas ekspor telah berhasil dikirimkan ke luar kota.

Angka delapan ton mungkin terlihat sederhana jika dibaca sepintas. Namun bagi masyarakat pesisir, capaian tersebut menjadi penanda bahwa hasil tangkapan dari sebuah kampung nelayan dapat bergerak menuju pasar yang lebih luas dengan kualitas yang tetap terjaga.

Di balik setiap kilogram ikan terdapat sebuah rantai panjang: nelayan yang melaut, ikan yang didaratkan, proses pendinginan dan penyimpanan, pengangkutan, hingga akhirnya sampai kepada konsumen.

Di sanalah pembangunan pesisir menemukan bentuk nyatanya.

Kemerdekaan tidak lagi berhenti sebagai slogan. Ia hadir dalam bentuk akses terhadap fasilitas, kemampuan mempertahankan mutu hasil tangkapan, terbukanya pasar, serta kesempatan bagi nelayan untuk memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik.

Petarung Penjaga Laut

Di tengah atmosfer kemerdekaan itu, suara Dr. Pung Nugroho Saksono, Direktur Jenderal PSDKP sekaligus Komandan Upacara, kembali mengingatkan bahwa menjaga laut bukan pekerjaan ringan.

Laut Indonesia yang luas menyimpan potensi ekonomi luar biasa, tetapi pada saat yang sama menghadirkan tantangan pengawasan yang kompleks. Praktik *illegal fishing*, penangkapan ikan yang merusak, dan berbagai pelanggaran pemanfaatan sumber daya dapat mengancam keberlanjutan laut sekaligus merugikan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya tersebut.

Karena itu, personel PSDKP dituntut memiliki ketangguhan, profesionalisme, sekaligus kedekatan dengan masyarakat.

“Personel PSDKP adalah para petarung: dibakar agar wangi seperti dupa, dan diasah agar tajam seperti pedang.”

— Dr. Pung Nugroho Saksono, Dirjen PSDKP KKP

Kalimat tersebut menggambarkan karakter yang dibutuhkan untuk menjaga ruang laut Indonesia: tangguh menghadapi ancaman, disiplin menjalankan tugas, dan tetap memiliki kepekaan terhadap masyarakat.

Sebab laut yang aman bukan hanya laut yang bebas dari pelanggaran.

Laut yang aman adalah laut yang memungkinkan nelayan bekerja dengan tenang, sumber daya tetap lestari, hasil tangkapan memiliki nilai ekonomi, dan generasi berikutnya masih dapat menggantungkan kehidupan pada kekayaan bahari Indonesia.

Kemerdekaan yang Berlabuh di Pesisir

Dari Konawe, peringatan kemerdekaan tahun ini membawa pesan yang melampaui seremoni.

Di darat, Menteri Kelautan dan Perikanan RI berdiri sebagai Inspektur Upacara, memimpin peringatan kemerdekaan dari tengah masyarakat pesisir. Di bawah komando Direktur Jenderal PSDKP sebagai Komandan Upacara, 800 personel

berdiri tegap menghadap Sang Merah Putih.

Di laut, sembilan Kapal Pengawas berjajar menjaga cakrawala. Di sekelilingnya, 300 kapal nelayan menjadi simbol kehidupan dan harapan masyarakat pesisir.

Sementara di dermaga, geliat KNMP Sorue Jaya menunjukkan wajah lain dari kemerdekaan: masyarakat pesisir yang semakin memiliki akses terhadap fasilitas, teknologi, kelembagaan ekonomi, dan pasar.

Semua bertemu dalam satu bentang yang sama.

Negara yang menjaga. Nelayan yang berdaya. Laut yang menjadi sumber kehidupan.

Dari tepian Konawe, pesan kemerdekaan itu kemudian berlayar menuju seluruh penjuru Nusantara. Bahwa menjaga kemerdekaan hari ini juga berarti menjaga laut, memastikan kekayaannya tidak dicuri atau dirusak, sekaligus memastikan masyarakat yang hidup darinya memperoleh kesejahteraan.

Dari Konawe untuk negeri, Merah Putih berkibar di tengah bahari.

Indonesia Merdeka. Nelayan Berdaya. Laut Terjaga.





KKP Tanggap Bencana, Salurkan 50 Ton Bantuan Logistik untuk Nusa Tenggara Timur

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bertepatan dengan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, KKP mengirimkan 50 ton bantuan logistik untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.

Bantuan tersebut diberangkatkan dari Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari menuju Pelabuhan Labuan Bajo, NTT, menggunakan Kapal Pengawas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen KKP untuk memastikan kehadiran negara tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan sektor kelautan dan perikanan, tetapi juga melalui aksi kemanusiaan ketika masyarakat menghadapi bencana.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan momentum kemerdekaan harus dimaknai sebagai kesempatan untuk memperkuat kepedulian dan semangat gotong royong antarsesama anak bangsa.

“Di tengah kita memperingati hari kemerdekaan, saudara-saudara kita di NTT sedang menghadapi musibah. Karena itu, kemerdekaan juga harus kita maknai dengan hadir dan bergotong royong membantu saudara kita yang membutuhkan,” tegas Menteri Trenggono.

Menurutnya, semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui perayaan, tetapi juga dengan memastikan masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan mendapatkan dukungan dan bantuan.

50 Ton Bantuan Dikirim Melalui Jalur Laut

Sebanyak 50 ton bantuan logistik dikumpulkan untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT.

Bantuan tersebut mencakup berbagai kebutuhan dasar, antara lain bahan makanan pokok, air bersih, tenda darurat, obat-obatan, serta perlengkapan medis.



Pengiriman melalui jalur laut dilakukan dengan memanfaatkan armada Kapal Pengawas PSDKP. Kapal yang dalam kesehariannya memiliki tugas utama melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tersebut, kali ini menjalankan misi kemanusiaan dengan membawa bantuan menuju wilayah terdampak.

Pemanfaatan jalur laut dinilai strategis untuk mendukung percepatan distribusi logistik, terutama ketika akses transportasi darat menuju sejumlah wilayah terdampak mengalami kendala akibat kerusakan infrastruktur.

Dari Kendari, kapal pengangkut bantuan akan menempuh perjalanan menuju Maumere, sebelum bantuan selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.



Laut Menjadi Jembatan Kemanusiaan

Pengiriman bantuan pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI juga menunjukkan peran strategis laut sebagai penghubung antarpulau.

Bentang geografis Indonesia yang dipisahkan oleh laut tidak semestinya menjadi hambatan dalam membangun solidaritas. Sebaliknya, laut dapat menjadi jalur yang mempertemukan kepedulian dari satu daerah dengan masyarakat di daerah lain yang sedang menghadapi bencana.

Bagi KKP, misi kemanusiaan ini sekaligus memperkuat semangat bahwa sumber daya dan infrastruktur kelautan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dalam situasi darurat.

Kapal Pengawas PSDKP yang biasanya berlayar menjaga laut Indonesia dari berbagai bentuk pelanggaran, termasuk praktik *illegal fishing*, kini membawa misi berbeda: mengantarkan bantuan dan harapan.

Pelepasan bantuan dari Kendari menuju NTT menjadi simbol bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang merayakan kebebasan, tetapi juga tentang hadir ketika sesama anak bangsa membutuhkan pertolongan.

Dari Sulawesi Tenggara menuju Nusa Tenggara Timur, laut kembali menunjukkan wajahnya sebagai penghubung Nusantara.

Bantuan Kemanusiaan KKP untuk Korban Gempa NTT Telah Tiba dan Tersalurkan

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menyatakan bahwa pengiriman bantuan kemanusiaan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara di tengah situasi krisis yang dialami masyarakat di NTT. Jajaran PSDKP dikerahkan penuh untuk menembus jalur laut melalui armada kapal pengawas demi memastikan bantuan logistik tiba tepat waktu tanpa terkendala keterbatasan akses darat.

"Kapal Pengawas Orca 06 telah bersandar di Pelabuhan Umum El Say, Maumere per Sabtu (22/8) kemarin membawa bantuan kemanusiaan hasil kolaborasi KKP dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan saat ini telah proses pendistribusian secara bertahap bersama BNPB," terang Ipunk.

"Kapal pengawas tidak hanya hadir untuk menjaga sumber daya kelautan dan perikanan serta mengawasi perairan Indonesia, tetapi juga siap dikerahkan untuk mendukung misi kemanusiaan ketika masyarakat membutuhkan," tegas Ipunk.

Ketika bencana datang, Indonesia tidak berjalan sendiri. Solidaritas berlayar, gotong royong bergerak, dan negara hadir.





Indonesia Perkuat Hukum Maritim Bersama Tiga Negara di RPOA-IUU

Indonesia terus memperkuat kerja sama penegakan hukum maritim dengan negara-negara di kawasan dalam menghadapi praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*. Komitmen tersebut ditegaskan melalui keikutsertaan Direktorat Penanganan Pelanggaran dalam Pertemuan ke-15 *Regional Plan of Action to Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (RPOA-IUU) Monitoring, Control, and Surveillance (MCS) Sub-Regional Group* untuk kawasan Laut Arafura dan Laut Timor.

Pertemuan yang berlangsung di Jakarta tersebut mempertemukan empat negara yang memiliki kepentingan strategis terhadap pengelolaan dan keamanan perairan kawasan, yakni Indonesia,



Australia, Papua Nugini, dan Timor-Leste. Forum ini menjadi ruang penting untuk memperkuat koordinasi pengawasan, pertukaran informasi, serta kerja sama penegakan hukum terhadap aktivitas perikanan ilegal yang melintasi batas negara.



Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP, Saiful Umam, S.St.Pi,MM, mengatakan kerja sama regional menjadi salah satu kunci dalam menghadapi karakteristik *IUU Fishing* yang semakin kompleks dan tidak mengenal batas yurisdiksi.

“Penanganan *IUU Fishing* tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja. Diperlukan pertukaran informasi, koordinasi pengawasan, dan langkah penegakan hukum yang terintegrasi agar celah pelanggaran lintas batas dapat ditutup,” ujar Saiful.

Dalam forum tersebut, Indonesia turut menyampaikan pengalaman dan perkembangan penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan, mulai dari pelaksanaan operasi pengawasan, penanganan perkara, hingga penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan penguatan sistem pengawasan Indonesia melalui



pemanfaatan teknologi, termasuk *Vessel Monitoring System (VMS)*, serta peningkatan partisipasi masyarakat pesisir sebagai bagian dari sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Ke depan, Indonesia berkomitmen meningkatkan intensitas patroli Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan di kawasan yang dinilai rawan terhadap praktik *IUU Fishing*. Penguatan koordinasi dengan negara-negara tetangga juga akan terus dilakukan, terutama dalam pertukaran informasi mengenai pergerakan kapal, dugaan pelanggaran, serta pola operasi pelaku.

Pertemuan RPOA-IUU MCS Sub-Regional Group menjadi momentum bagi Indonesia dan tiga negara mitra untuk menyatukan langkah menghadapi ancaman *IUU Fishing*. Dengan pengawasan yang lebih terintegrasi, pertukaran informasi yang semakin cepat, serta penegakan hukum yang konsisten, upaya menjaga Laut Arafura dan Laut Timor diharapkan semakin kuat.





DIKLAT PENGAWAS PERIKANAN 2026

Menjaga Laut, Merawat Masa Depan

Menjaga laut Indonesia tidak cukup hanya dengan memperkuat armada pengawasan dan regulasi. Di balik setiap operasi pengawasan, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, keberanian, dan integritas untuk memastikan sumber daya kelautan dan perikanan tetap terlindungi.

Dengan luas wilayah laut Indonesia yang mencapai sekitar 6,4 juta kilometer persegi, kebutuhan terhadap aparatur pengawasan yang profesional menjadi semakin penting. Laut tidak hanya menyimpan kekayaan sumber

daya alam, tetapi juga menjadi ruang hidup bagi jutaan masyarakat serta salah satu penopang perekonomian nasional.

Berbagai ancaman seperti *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*, kerusakan ekosistem pesisir, hingga pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan menuntut sistem pengawasan yang semakin adaptif dan profesional.

Menjawab kebutuhan tersebut, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) bersama Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan



(Diklat) Dasar Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Asisten Pengawas Perikanan Tahun 2026.

Sebanyak 460 peserta mengikuti program ini. Sebanyak 411 peserta berasal dari lingkungan internal Ditjen PSDKP, sementara 49 peserta lainnya merupakan perwakilan dari pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia.

Direktur Jenderal PSDKP Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M., menegaskan bahwa penguatan kompetensi aparatur merupakan bagian penting dari strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

“Pengawas perikanan adalah garda terdepan dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan. Karena itu, mereka harus memiliki kompetensi, integritas, dan keberanian untuk melaksanakan tugas secara profesional,” ujar Ipunk, sapaan akrab Pung Nugroho Saksono.

Menurutnya, tantangan pengawasan di lapangan terus berkembang. Pengawas tidak hanya dituntut memahami regulasi, tetapi juga harus mampu membaca dinamika aktivitas perikanan, mengidentifikasi potensi pelanggaran, serta mengambil keputusan secara tepat dan terukur.

“Jangan hanya menjadi pengawas yang tahu aturan. Jadilah pengawas yang mampu menerapkan aturan dengan benar, memahami kondisi di lapangan, dan tetap mengedepankan integritas,” tegasnya.

Diklat tersebut dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Proses pembelajaran diawali melalui distance learning, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran dan praktik yang mencakup regulasi, teknik pengawasan operasional, penyusunan laporan, kode etik profesi, hingga aspek keselamatan kerja.

Peserta juga mendapatkan kesempatan mengikuti simulasi dan praktik lapangan. Metode tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan peserta tidak berhenti pada penguasaan teori, tetapi mampu menerapkannya ketika menghadapi situasi nyata di wilayah perairan.

Bagi Pengawas Perikanan dan Asisten Pengawas Perikanan, kemampuan teknis harus berjalan beriringan dengan karakter dan integritas. Medan tugas yang dinamis menuntut ketelitian dalam mengidentifikasi pelanggaran, ketegasan dalam menjalankan kewenangan, sekaligus kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak.

Keterlibatan 49 peserta dari pemerintah daerah juga memberikan dimensi penting dalam pelaksanaan diklat. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan membutuhkan keterhubungan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama karena karakteristik wilayah perairan Indonesia sangat beragam.

“Pengawasan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Pusat dan daerah harus memiliki visi yang sama. Semakin kuat jejaring pengawasan kita, semakin kuat pula kemampuan negara dalam melindungi sumber daya kelautan dan perikanan,” kata Ipunk.

Menyiapkan Penjaga Laut Masa Depan

Diklat Dasar Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Asisten Pengawas Perikanan Tahun 2026 pada akhirnya bukan sekadar kegiatan peningkatan kompetensi aparatur. Program ini merupakan investasi jangka panjang untuk membangun sistem pengawasan yang semakin kuat, profesional, dan responsif terhadap perubahan.

Para peserta dipersiapkan untuk menjadi bagian dari barisan pengawas yang mampu bekerja berbasis data, memahami perkembangan teknologi pengawasan, mengedepankan keselamatan, serta menjunjung tinggi etika dan integritas.

“Kalau SDM pengawas kita kuat, sistem pengawasan kita juga akan semakin kuat. Mereka

inilah yang akan menjadi penjaga sumber daya kelautan dan perikanan untuk masa depan,” ungkap Ipunk.

Dengan semakin banyaknya pengawas yang kompeten dan berintegritas, upaya menekan *IUU Fishing*, menjaga ekosistem, serta memastikan kepatuhan pelaku usaha dapat dilakukan secara lebih efektif. Pada saat yang sama, keberadaan pengawas di lapangan juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi nelayan serta pelaku usaha yang menjalankan kegiatan sesuai ketentuan.

Sebab, menjaga laut bukan hanya tentang mengawasi wilayah perairan hari ini. Lebih jauh, tugas tersebut adalah memastikan kekayaan laut tetap tersedia dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi yang akan datang.

Menjaga laut membutuhkan pengawasan. Pengawasan membutuhkan manusia yang berkompeten. Dan manusia-manusia itulah yang hari ini sedang dipersiapkan untuk menjadi penjaga masa depan laut Indonesia.





KKP Tindak Pemanfaatan 271 Ekor Arwana Dilindungi Tanpa Izin di Riau



KKP terus memperketat pengawasan terhadap tata kelola pemanfaatan keanekaragaman hayati laut dan perairan darat. Langkah tersebut kembali ditegaskan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang, bersama Direktorat Pendayagunaan Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil/Pengawasan Sumber Daya Perikanan (PSDP) serta Stasiun PSDKP Belawan, mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan usaha pengembangbiakan ikan arwana milik PT AWL di Pekanbaru, Riau.

Penindakan itu dilakukan setelah tim pengawas menemukan adanya indikasi pelanggaran dalam

kegiatan budi daya sekaligus pemanfaatan komoditas akuatik bernilai ekonomi tinggi tersebut. Karena itu, kegiatan usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan spesies dilindungi tersebut dikenai sanksi penghentian sementara hingga seluruh aspek legalitas dan perizinannya dipenuhi.

Dalam pemeriksaan di lokasi, petugas menemukan 2.914 ekor ikan arwana. Dari jumlah tersebut, 271 ekor merupakan arwana yang termasuk jenis dilindungi, terdiri atas varian *Super Red (Scleropages formosus)* dan *Golden (Scleropages inscriptus/Scleropages formosus)*.

Kedua jenis tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi dan mendapatkan perlindungan berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk tercantum dalam daftar *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*.

Direktur Jenderal PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M., menegaskan bahwa status perlindungan suatu jenis ikan membawa konsekuensi terhadap tata kelola pemanfaatannya. Pelaku usaha tidak dapat melakukan pemanfaatan secara bebas tanpa memenuhi ketentuan perizinan.

"Jenis ikan yang dilindungi memiliki ketentuan khusus dalam pemanfaatannya. Ketika pelaku usaha ingin melakukan pemanfaatan, termasuk pengembangbiakan untuk kepentingan komersial, seluruh persyaratan dan perizinan harus dipenuhi. Ini bukan semata persoalan administrasi, tetapi bagian dari upaya negara menjaga keberlanjutan sumber daya genetik dan keanekaragaman hayati," ujar Ipunk.

Hasil pemeriksaan menunjukkan PT AWL belum memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) untuk kegiatan pemanfaatan jenis ikan dilindungi tersebut.

Atas temuan itu, Ditjen PSDKP mengambil langkah penegakan hukum administratif berupa penygelan dan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan. Penghentian dilakukan untuk memastikan aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan, distribusi, maupun komersialisasi jenis ikan dilindungi tidak berlanjut sebelum persyaratan yang diwajibkan dipenuhi.

Ipunk menegaskan, tindakan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan untuk

memastikan pelaku usaha menjalankan kegiatan sesuai ketentuan.

"Kami tidak ingin kegiatan usaha berhenti hanya karena persoalan yang sebenarnya dapat dipenuhi melalui kepatuhan terhadap regulasi. Tetapi selama persyaratan belum dipenuhi, kegiatan pemanfaatan tidak boleh berjalan. Setelah seluruh ketentuan dipenuhi, tentu dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku," jelasnya.

Menurut Ipunk, perizinan dalam pemanfaatan jenis ikan dilindungi memiliki fungsi yang lebih besar daripada sekadar kelengkapan administratif. Melalui mekanisme perizinan, pemerintah dapat memastikan pemanfaatan berlangsung secara terkendali, terukur, dan tidak mengancam keberlangsungan populasi maupun sumber daya genetik.

Ikan arwana *Super Red* dan *Golden* merupakan komoditas akuatik dengan nilai ekonomi tinggi. Tingginya nilai ekonomi tersebut pada saat yang sama menjadi tantangan dalam pengawasan



karena dapat mendorong peningkatan pemanfaatan tanpa memperhatikan aspek perlindungan.

Ipunk menilai bahwa pengembangan usaha akuakultur harus tetap berjalan seiring dengan prinsip keberlanjutan. Pemanfaatan secara komersial tidak boleh mengesampingkan status perlindungan dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Potensi ekonomi dari sumber daya perikanan memang harus kita dorong. Tetapi ekonomi dan konservasi bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya harus berjalan bersama. Usaha dapat berkembang, sementara sumber daya dan keanekaragaman hayati tetap terjaga,” kata Ipunk.

Ia juga mengingatkan pelaku usaha agar memahami status jenis ikan yang dimanfaatkan

serta memastikan seluruh dokumen dan perizinan telah dipenuhi sebelum melakukan kegiatan.

“Kami mengimbau pelaku usaha untuk tidak menunggu sampai dilakukan pemeriksaan. Pastikan sejak awal jenis yang dimanfaatkan, asal-usulnya, dokumennya, dan izinnya jelas. Kepatuhan sejak awal akan jauh lebih baik daripada harus berhadapan dengan proses penindakan,” tegasnya.

Karena itu, Ipunk menegaskan bahwa kewajiban memiliki perizinan seperti SIPJI bukan sekadar formalitas administratif atau pemenuhan aturan di atas kertas. Sebaliknya, perizinan merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya ikan berlangsung secara terkendali. Melalui kepatuhan tersebut, potensi eksploitasi berlebihan (*over-exploitation*) dapat dicegah, sementara keberadaan plasma nutfah perikanan Indonesia dapat terus dijaga.

Tindakan di Pekanbaru itu sekaligus menjadi penegasan bahwa pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan tidak dapat dilepaskan dari prinsip legalitas, kehati-hatian, dan keberlanjutan. Sebab, ketika komoditas yang dimanfaatkan merupakan spesies yang memiliki status perlindungan, maka tanggung jawab pelaku usaha bukan hanya berkaitan dengan keuntungan ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan sumber daya genetik dan keseimbangan ekosistem.

Penindakan terhadap PT AWL menjadi pesan yang lebih luas bagi pelaku usaha perikanan dan akuakultur di seluruh Indonesia. Pertumbuhan industri dan keberlanjutan usaha harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap regulasi. Sebab, keuntungan ekonomi tidak boleh mengorbankan keanekaragaman hayati yang menjadi warisan bangsa.

Di tengah meningkatnya nilai ekonomi berbagai komoditas akuatik, ketegasan pengawasan menjadi semakin penting. Dengan demikian, ketika aturan dipatuhi dan pemanfaatan dilakukan secara bertanggung jawab, sumber daya perikanan tidak hanya memberikan manfaat bagi generasi saat ini, tetapi juga tetap tersedia sebagai warisan kehidupan bagi generasi mendatang.





Gedung Baru, Energi Baru Perkuat Benteng Pengawasan Laut Sulawesi Utara

KKP terus memperkuat benteng pengawasan wilayah perairan bagian utara Indonesia. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui peningkatan kapasitas personel dan teknologi, tetapi juga dengan menghadirkan infrastruktur yang mampu menopang kerja pengawasan secara lebih efektif. Karena itu, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M. atau Ipunk, meresmikan gedung kantor baru Satuan Pengawasan (Satwas) SDKP Manado, Sulawesi Utara.

Gedung Kantor Satwas SDKP Manado merupakan bangunan dua lantai dengan luas sekitar 247,5 m2, yang berdiri di atas lahan seluas 47,5 meter persegi. Bangunan beserta lahannya merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan berada dalam kawasan PPP Tumumpa. Dukungan tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang semakin kuat.

Dengan fasilitas kantor yang lebih representatif, pelaksanaan tugas pengawasan diharapkan dapat berlangsung secara lebih efektif dan terkoordinasi. Kantor ini menjadi ruang bagi

jajaran pengawasan untuk mengonsolidasikan informasi, menyusun langkah tindak lanjut, serta memperkuat komunikasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Lebih dari itu, keberadaan Satwas SDKP Manado di kawasan pelabuhan juga memberikan nilai strategis. Kedekatannya dengan pusat aktivitas perikanan memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih responsif terhadap berbagai dinamika di lapangan. Interaksi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, nelayan, serta pemangku kepentingan lainnya pun dapat dibangun secara lebih intensif.

Penguatan prasarana pengawasan bukan semata tentang menghadirkan gedung baru. Di baliknya terdapat ikhtiar untuk memastikan laut dan sumber daya perikanan Indonesia dikelola secara

tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Dari Tumumpa, pengawasan di Sulawesi Utara diharapkan semakin hadir, semakin dekat, dan semakin sigap menjaga sumber daya kelautan dan perikanan untuk kepentingan generasi kini maupun mendatang.

“Gedung baru ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan simbol lahirnya energi baru untuk memperkuat benteng pengawasan kita. Penegakan hukum di laut butuh kecepatan, ketepatan, dan keterpaduan. Dari fasilitas inilah strategi operasional dihimpun untuk memastikan sumber daya kelautan Sulawesi Utara terlindungi secara optimal,” ujar Ipunk.

Maka, “gedung baru, energi baru” bukan hanya sebuah ungkapan, melainkan semangat untuk membangun sistem pengawasan laut yang modern, profesional, terpadu, dan berwibawa.





Gerak Nyata Dharma Wanita DITJEN PSDKP untuk Generasi Masa Depan

Di tengah padatnya rutinitas harian dan tuntutan peran ganda sebagai pendamping suami serta penggerak keluarga, menjaga kesehatan tubuh kerap kali terabaikan oleh para perempuan. Memahami betapa krusialnya peran seorang wanita dalam membangun fondasi keluarga yang kuat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan perempuan, Dharma Wanita Persatuan Direktorat Jenderal PSDKP menggelar Seminar Kesehatan Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim, bertempat di Ruang Rapat Pangkalan PSDKP Bitung.

Kegiatan bernilai edukatif ini dihadiri langsung oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Ditjen PSDKP,

Ibu Banat Mustika Heruwiyani Pung Nugroho. Untuk mengulas materi secara mendalam dan terpercaya, seminar ini menghadirkan dr. Lanny Mamahit, M.Kes. sebagai narasumber utama.

Kanker payudara dan kanker leher rahim (serviks) hingga saat ini masih menjadi ancaman utama bagi kesehatan perempuan di Indonesia. Sering kali, keterlambatan penanganan terjadi karena minimnya pemahaman mengenai gejala awal atau rasa enggan untuk melakukan pemeriksaan berkala. Melalui edukasi mengenai faktor risiko, gejala awal, pencegahan, dan pemeriksaan berkala, kegiatan ini menjadi langkah nyata membangun perempuan Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif.

Dalam sesi pemaparan, dr. Lanny Mamahit, M.Kes. menekankan bahwa kunci utama penanganan

kanker secara efektif adalah kewaspadaan serta tindakan proaktif. Proses ini diawali dengan mengenali faktor risiko melalui pemahaman atas riwayat kesehatan keluarga, pola hidup harian, serta menghindari paparan zat berbahaya yang berpotensi meningkatkan risiko penyakit.

Langkah selanjutnya adalah mewaspadaai gejala awal dengan tidak mengabaikan perubahan sekecil apa pun pada tubuh serta segera berkonsultasi ke tenaga medis jika menemukan indikasi mencurigakan. Selain itu, pemahaman ini disempurnakan dengan melakukan pemeriksaan berkala, yaitu menggalakkan metode pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) serta melakukan penapisan (*screening*) rutin seperti IVA test atau Pap smear untuk deteksi dini kanker leher rahim.

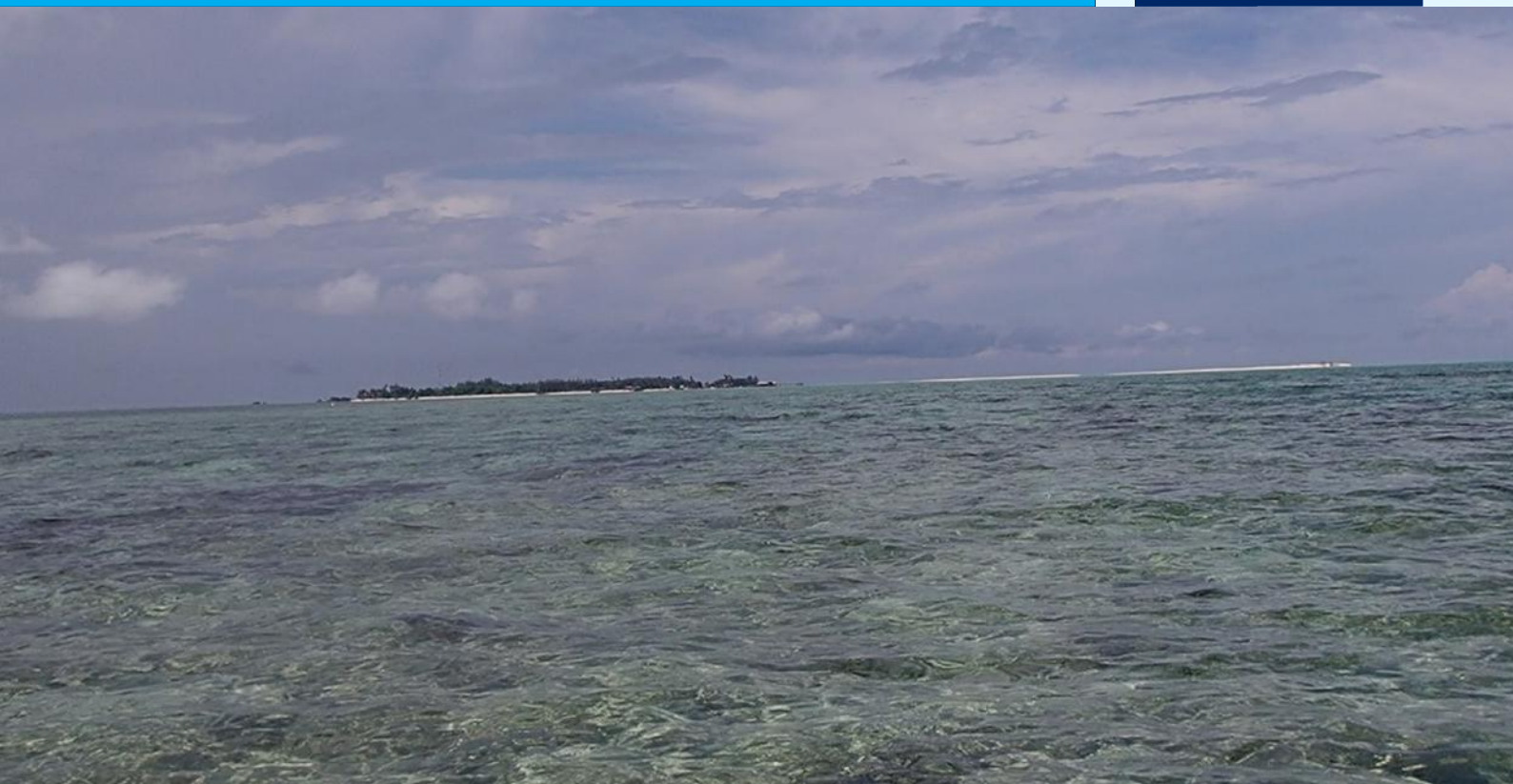
Kehadiran para anggota dalam acara seminar ini memperlihatkan antusiasme yang luar biasa. Diskusi hangat serta tanya jawab interaktif menghidupkan suasana seminar, membuktikan betapa besarnya perhatian para pengurus dan anggota terhadap isu-isu kesehatan vital ini.

Lebih dari sekadar sesi edukasi medis, acara ini berhasil mempererat tali silaturahmi antaranggota DWP Ditjen PSDKP. Kehadiran Ibu Banat Mustika Heruwiyani Pung Nugroho beserta jajaran pengurus memberikan motivasi kuat bahwa dukungan antar sesama perempuan



(women supporting women) sangat penting dalam menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya *self-care*.





KAPAL KANDAS, SENGKETA TUNTAS

Penyelesaian Kerusakan Terumbu Karang LCT Reymond Melalui Jalur Nonlitigasi

Penanganan kasus kandasnya LCT Reymond di perairan Pulau Panjang, Kampung Pulau Derawan, Kalimantan Timur, berakhir melalui kesepakatan penyelesaian di luar pengadilan (Nonlitigasi). Langkah tersebut ditempuh setelah proses pengawasan, verifikasi lapangan, kajian ahli, hingga valuasi kerusakan dilakukan untuk memastikan bentuk pertanggungjawaban yang tepat.

Peristiwa tersebut pertama kali dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) melalui surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur pada 29 November 2025. Menindaklanjuti laporan tersebut, Polsus PWP3K Stasiun PSDKP Tarakan melaku-

kan pengambilan bahan dan keterangan guna mengungkap fakta kejadian serta memastikan dampaknya terhadap ekosistem pesisir.

Hasil penelusuran awal mengindikasikan adanya potensi kerusakan terumbu karang akibat kandasnya kapal. Dalam proses penanganan, PT Berlian Samudera Khatulistiwa selaku perusahaan penanggung jawab menunjukkan sikap kooperatif dan menyatakan kesediaannya bertanggung jawab apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kerusakan.

Komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam *Letter of Understanding (LoU)* yang disampaikan kepada Direktur Jenderal PSDKP. Perusahaan juga menyatakan kesediaan mengikuti seluruh tahapan penyelesaian atas kejadian kandasnya LCT Reymond.

Direktur Jenderal PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M., menegaskan bahwa penyelesaian perkara lingkungan harus dibangun di atas fakta dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami tidak ingin mengambil keputusan hanya berdasarkan dugaan. Setiap kerusakan harus diverifikasi, diukur, dan dianalisis secara ilmiah agar pertanggungjawaban yang ditetapkan benar-benar proporsional,” ujar Pung

Untuk memastikan tingkat kerusakan secara objektif, Ditjen PSDKP melibatkan tim ahli independen dari Universitas Halu Oleo. Tim tersebut terdiri atas ahli bioekologi karang, ahli kerusakan karang, serta ahli valuasi ekonomi pesisir dan laut.

Berdasarkan hasil verifikasi, ditemukan kerusakan terumbu karang akibat benturan fisik dengan badan kapal. Kerusakan berupa karang yang tergerus, terbelah, patah, hingga berpindah atau terbawa arus.

Kerusakan paling dominan ditemukan dalam bentuk patahan karang atau *rubble*. Kondisi tersebut ditemukan pada kedalaman sekitar 0,5 hingga 2 meter ketika air laut berada dalam kondisi surut. Sementara itu, area terdampak

memiliki panjang sekitar 48 meter, dengan lebar terluas mencapai 25 meter dan lebar tersempit sekitar 3,2 meter. Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis, luas kerusakan tercatat mencapai 501,94 meter persegi.

Namun demikian, proses verifikasi tidak berhenti pada penghitungan luasan kerusakan. Sebab, untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban yang proporsional, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai bagian kerusakan yang dapat dikompensasi. Setelah melalui analisis tersebut, diperoleh luasan kerusakan terkompensasi sebesar 11,84 meter persegi.

Temuan itu sekaligus memperlihatkan bahwa kandasnya sebuah kapal bukan sekadar persoalan teknis pelayaran. Di balik badan kapal yang berhenti di perairan dangkal, terdapat ekosistem pesisir yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi. Terumbu karang, misalnya, bukan hanya bentang alam yang berada di dasar laut, melainkan bagian penting dari sistem ekologis yang menopang kehidupan berbagai biota sekaligus mendukung keberlangsungan masyarakat pesisir.

Di sisi lain, hasil pengamatan dan wawancara di lapangan juga memastikan bahwa tidak terdapat





laporan mengenai kerugian yang dialami masyarakat akibat peristiwa tersebut. Fakta ini kemudian menjadi bagian dari keseluruhan proses penilaian, sehingga setiap aspek dampak dapat dipertimbangkan secara menyeluruh sebelum menentukan langkah penyelesaian.

Setelah melalui tahapan pengambilan bahan dan keterangan, verifikasi lapangan, kajian para ahli, hingga analisis valuasi, proses penanganan akhirnya diarahkan pada penyelesaian yang memberikan kepastian mengenai tanggung jawab. Dengan rangkaian proses tersebut, keputusan tidak semata-mata didasarkan pada dugaan, tetapi bertumpu pada fakta, pengukuran, serta kajian ilmiah.

Menurut Pung, proses tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan ilmiah dalam menangani persoalan lingkungan akibat aktivitas di laut.

“Yang kami jaga bukan hanya bagaimana persoalan ini selesai, tetapi bagaimana penyelesaiannya tetap memberikan kepastian hukum, memenuhi tanggung jawab, dan memastikan kepentingan ekosistem pesisir tidak terabaikan,” katanya.

Hasil pengamatan dan wawancara di lapangan juga menunjukkan tidak terdapat laporan mengenai kerugian yang dialami masyarakat akibat peristiwa tersebut. Fakta tersebut menjadi salah satu bagian yang dipertimbangkan dalam keseluruhan proses penilaian dampak.

Pung menilai penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan dapat menjadi instrumen penyelesaian yang efektif sepanjang dilakukan berdasarkan mekanisme yang jelas, hasil verifikasi yang objektif, serta adanya pengakuan dan pemenuhan tanggung jawab dari pihak yang berkewajiban.

“Penyelesaian di luar pengadilan bukan berarti mengesampingkan penegakan hukum. Justru yang kami dorong adalah bagaimana tanggung jawab tetap dipenuhi, kerugian lingkungan diperhitungkan secara tepat, dan kepentingan pemulihan lingkungan menjadi bagian dari penyelesaian,” tegas Ipunk.

Penanggung jawab LCT Reymond menyatakan sepakat untuk membayar ganti kerugian atas kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada pemerintah. Kesepakatan tersebut menjadi titik penting setelah melalui proses panjang untuk memastikan fakta kejadian sekaligus menghitung dampak yang ditimbulkan. Adapun batas akhir pembayaran ditetapkan paling lambat Oktober 2026.

Bagi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, kasus LCT Reymond memberikan pesan yang kuat bahwa setiap aktivitas di laut selalu membawa konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Ketika sebuah kapal kandas dan ekosistem mengalami dampak, persoalannya bukan semata-mata tentang siapa yang salah, melainkan bagaimana kerusakan dapat dihitung secara ilmiah, tanggung jawab dapat dipenuhi, dan kepentingan lingkungan tetap ditempatkan sebagai bagian utama dalam pengambilan keputusan.

“Laut bukan ruang tanpa konsekuensi. Setiap aktivitas harus dilakukan secara bertanggung jawab. Ketika terjadi kerusakan, negara hadir untuk memastikan fakta terungkap, dampak dihitung, dan tanggung jawab dipenuhi,” pungkas Ipunk.





Menjaga Air Laut, Menjaga Ekosistem

Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) kini menempati ruang penting dalam pengawasan subsektor kelautan. Di tengah bentang laut Indonesia yang begitu luas, air laut tidak hanya menjadi bagian penting dari ekosistem, tetapi juga terus berkembang sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi sekaligus manfaat teknis bagi berbagai sektor.

Pemanfaatannya pun semakin beragam. Air laut dapat diolah melalui proses desalinasi untuk menghasilkan air bersih dan air minum dengan teknologi *Seawater Reverse Osmosis* (SWRO). Selain itu, air laut dimanfaatkan sebagai pendingin mesin industri dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), sekaligus digunakan untuk produksi garam, sarana rekreasi, hingga

mendukung kegiatan pembudidayaan ikan. Dengan demikian, beragam pemanfaatan tersebut memperlihatkan betapa besar potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dari sumber daya laut, sepanjang dikelola secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Namun, di balik besarnya potensi tersebut, terdapat kebutuhan yang tidak kalah penting, yakni memastikan setiap aktivitas pemanfaatan ALSE berjalan dalam koridor tata kelola yang baik. Karena itu, setiap kegiatan pemanfaatan air laut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Sejalan dengan meningkatnya aktivitas pemanfaatan ALSE, perhatian terhadap aspek penga-



wasan pun terus diperkuat. Sepanjang 2025, sebanyak 65 pelaku usaha telah diperiksa. Dari jumlah tersebut, 55 pelaku usaha diketahui belum memiliki izin pemanfaatan ALSE. Atas berbagai pelanggaran yang ditemukan, sebanyak 24 pelaku usaha kemudian dikenai sanksi administratif, mulai dari surat teguran hingga denda.

Pengenaan sanksi tersebut bukan semata-mata sebagai bentuk penindakan, melainkan menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan berlangsung tertib, legal, dan bertanggung jawab. Terlebih, ketentuan mengenai sanksi administratif mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Permen KP Nomor 26 Tahun 2022.

Memasuki 2026, intensitas pengawasan bahkan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Hingga Juli 2026, tercatat 78 pelaku usaha telah diawasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 51 pelaku usaha masih beroperasi tanpa izin pemanfaatan ALSE dan kini berada dalam proses pengenaan sanksi administratif.

Angka-angka tersebut sekaligus menjadi gambaran bahwa pemahaman sebagian pelaku usaha terhadap regulasi pemanfaatan ALSE masih perlu terus diperkuat. Sebab, pengawasan tidak seharusnya hanya dipandang sebagai instrumen untuk menertibkan atau memberikan sanksi ketika terjadi pelanggaran. Lebih dari itu, pengawasan juga menjadi sarana untuk membangun kesadaran bahwa setiap pemanfaatan air laut harus dilakukan secara legal, terukur, serta tetap memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan demikian, pengawasan ALSE pada akhirnya bukan sekadar persoalan memastikan terpenuhinya kewajiban perizinan. Di balik proses pemeriksaan, pembinaan, hingga pemberian sanksi, terdapat tujuan yang lebih besar, yakni menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kebutuhan pembangunan, dan kelestarian ekosistem laut.

Sebab, ketika air laut dimanfaatkan secara tertib dan bertanggung jawab, potensi ekonomi dapat terus tumbuh tanpa harus mengorbankan lingkungan. Sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak dikendalikan, sumber daya yang semestinya menjadi kekuatan pembangunan justru berpotensi menimbulkan tekanan terhadap ekosistem.

Karena itu, pengawasan ALSE menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola kelautan yang berkelanjutan. Laut yang dikelola dengan tertib hari ini bukan hanya menghadirkan manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha, tetapi juga menjadi investasi ekologis dan ekonomi bagi generasi yang akan datang.





PSDKP dan BARESKRIM POLRI Perkuat Sinergi Penyidikan Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan

Menghadapi dinamika kejahatan kelautan dan perikanan yang semakin kompleks sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan regulasi, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Bareskrim Polri memperkuat koordinasi penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) baru.

Pertemuan koordinasi tersebut menjadi momentum untuk menyamakan persepsi dan memperkuat mekanisme kerja antara PPNS Perikanan dengan Korwas PPNS Bareskrim Polri. Penguatan ini diperlukan agar perubahan ketentuan hukum acara dapat diimplementasikan secara tepat dalam setiap tahapan penyidikan, mulai dari penanganan perkara pada tahap awal hingga proses hukum selanjutnya.

Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono mengatakan bahwa penyesuaian terhadap KUHP baru perlu diikuti dengan penguatan koordinasi antara PPNS Perikanan dan Korwas PPNS Bareskrim Polri.

“Dengan adanya KUHP baru, tentu terdapat penyesuaian yang harus dipahami dan diimplementasikan oleh penyidik. Karena itu, koordinasi dengan Korwas PPNS menjadi sangat penting agar proses penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan tetap berjalan sesuai ketentuan dan memiliki kepastian hukum,” ujar Ipunk.

Menurut Ipunk, koordinasi tidak hanya dibutuhkan ketika perkara telah masuk dalam pros-



es penyidikan. Pendampingan sejak tahap awal justru menjadi bagian penting untuk memastikan langkah-langkah penyidikan telah dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum acara.

“Pendampingan sejak awal sangat penting. Kita ingin setiap tahapan penyidikan dapat dilakukan dengan benar, sehingga ketika perkara berlanjut, berkas yang disusun sudah memenuhi ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” jelasnya.

Selain pendampingan penyidikan, pertemuan tersebut juga membahas penguatan digitalisasi administrasi penyidikan melalui aplikasi e-PPNS. Digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan ketertiban administrasi, mempercepat proses pelaporan dan koordinasi, serta memudahkan pemantauan pelaksanaan penyidikan oleh PPNS.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Ditjen PSDKP bersama Korwas PPNS Bareskrim Polri mendorong percepatan sertifikasi PPNS sekaligus peningkatan kompetensi penyidik agar memiliki kemampuan yang semakin kuat dalam menangani karakteristik tindak pidana kelautan dan perikanan.

“PPNS merupakan ujung tombak dalam penanganan perkara di lapangan. Karena itu, kompetensi



dan profesionalismenya harus terus diperkuat. Sertifikasi dan peningkatan kapasitas menjadi bagian penting agar penyidik memiliki kemampuan yang sesuai dengan tantangan penegakan hukum saat ini,” kata Ipunk.

Ia menambahkan bahwa penanganan tindak pidana perikanan memiliki karakteristik tersendiri, termasuk dalam mengidentifikasi modus operandi, mengumpulkan alat bukti, menelusuri keterkaitan pelaku, hingga menangani dugaan tindak pidana yang melibatkan badan usaha atau korporasi.

Di sisi lain, integrasi data dan informasi antara Ditjen PSDKP dan Bareskrim Polri juga menjadi kebutuhan strategis. Pertukaran informasi yang cepat dan akurat dapat mendukung deteksi dini, memperkuat proses penyidikan, serta membantu aparat mengidentifikasi pola pelanggaran yang berpotensi berkembang menjadi tindak pidana.

“Penegakan hukum tidak bisa bekerja dalam ruang yang terpisah. Kita membutuhkan koordinasi, data, dan informasi yang terhubung. Dengan begitu, penanganan perkara bisa lebih cepat, tepat, dan tidak menimbulkan persoalan pada tahapan berikutnya,” ungkap Ipunk.

Penguatan sinergi tersebut menjadi semakin penting ditengah ancaman Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing) serta berbagai bentuk kejahatan kelautan dan perikanan yang terus berkembang. Luasnya wilayah perairan Indonesia dan kompleksitas modus pelanggaran menuntut respons penegakan hukum yang terintegrasi antar lembaga.

Melalui koordinasi yang semakin solid, Ditjen PSDKP dan Korwas PPNS Bareskrim Polri berkomitmen membangun mekanisme penyidikan yang lebih efektif, profesional, dan adaptif terhadap perubahan hukum. Upaya tersebut sekaligus memastikan penegakan hukum mampu memberikan kepastian, melindungi sumber daya kelautan dan perikanan, serta menjaga kepentingan nelayan dan pelaku usaha yang taat hukum.

“Tujuan akhirnya adalah menghadirkan penegakan hukum yang profesional dan memberikan kepastian hukum. Sumber daya kelautan dan perikanan harus kita jaga bersama, dan setiap pelanggaran harus ditangani secara tepat berdasarkan hukum yang berlaku,” pungkas Ipunk.

Hal serupa disampaikan juga oleh Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Karo Korwas PPNS) Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Edy Suranta Sitepu, S.I.K., M.H yang menyatakan bahwa Kunjungan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antara Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri dengan PPNS Ditjen PSDKP dalam mendukung penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.

“Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri menegaskan komitmen untuk terus memperkuat pembinaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap PPNS di seluruh kementerian dan lembaga, sehingga tercipta penegakan hukum yang profesional, terintegrasi, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat” ujar Edy.



PSDKP SMART CHAPTER 13

Mengubah Setiap Detik Patroli Menjadi Cerita Inspiratif Publik

Dari Laut ke Layar, dari Aksi Menjadi Inspirasi

Laut Indonesia tidak pernah benar-benar tidur. Dari Sabang hingga Merauke, ribuan kapal melintas, aktivitas ekonomi bergerak, dan ekosistem laut terus menghadapi berbagai tekanan. Di tengah dinamika tersebut, para penjaga laut Ditjen PSDKP hadir memastikan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia tetap terlindungi.

Namun, menjaga laut bukan hanya tentang apa yang dilakukan di lapangan. Di era digital, bagaimana sebuah aksi diceritakan kepada publik juga menjadi bagian penting dari perjuangan menjaga laut.

Setiap patroli, pemeriksaan kapal, penindakan *illegal fishing*, hingga penyelamatan sumber daya kelautan menyimpan cerita tentang dedikasi dan keberanian. Cerita-cerita tersebut tidak semestinya berhenti sebagai laporan kedinasan atau tersimpan di ruang arsip. Ia perlu hadir di ruang publik—menjadi informasi, edukasi, sekaligus inspirasi.



Kesadaran inilah yang menjadi salah satu semangat PSDKP Smart Chapter 13 yang digelar pada Jumat, 31 Juli 2026. Mengusung tema “PSDKP Jago Ngonten: Tips Bikin Konten Kreatif, Viral, dan Beretika”, kegiatan yang berlangsung pukul 08.30–11.30 WIB tersebut menjadi ruang pembelajaran bagi insan PSDKP untuk semakin adaptif terhadap perkembangan komunikasi digital.



Belajar Ngonten dari Sesama ASN

Salah satu daya tarik PSDKP Smart Chapter 13 adalah kehadiran Chandra Akasa atau yang lebih dikenal dengan @pakachun6, kreator konten yang juga memiliki latar belakang sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Kehadirannya memberikan perspektif yang dekat dengan keseharian peserta: bahwa menjadi ASN dan menjadi kreator konten bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan.

Justru, pengalaman sebagai ASN dapat menjadi kekuatan dalam membangun konten yang memiliki nilai edukasi dan dampak sosial.

Dalam sesi tersebut, peserta diajak melihat bahwa membuat konten tidak selalu membutuhkan peralatan mahal atau produksi yang rumit. Ide dan kemampuan menangkap momentum justru menjadi modal utama. Aktivitas sehari-hari di lingkungan kerja, termasuk kegiatan kedinasan di lapangan, dapat menjadi sumber cerita yang menarik apabila dikemas dengan sudut pandang yang tepat.

Pakachun, sebutan Chandra Akasa juga berbagi pengalaman mengenai bagaimana membangun konten yang mampu menarik perhatian audiens, memahami karakter pengguna media sosial, serta mengemas informasi menjadi cerita yang lebih ringan dan mudah diterima.

Bagi ASN PSDKP yang setiap hari bersentuhan dengan aktivitas pengawasan, pengalaman tersebut menjadi relevan. Sebab, mereka sesungguhnya memiliki bahan cerita yang sangat kaya—tinggal bagaimana mengubahnya menjadi konten yang mampu berbicara kepada publik.

Kreatif Boleh, Etika Jangan Terlewat

Di tengah persaingan mendapatkan perhatian di media sosial, konten yang menarik memang penting. Namun, popularitas bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.

PSDKP Smart Chapter 13 menempatkan kreativitas dan etika sebagai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Konten boleh dibuat menarik, bahkan viral, tetapi tetap harus berpijak pada fakta, menjaga integritas institusi, serta mematuhi ketentuan komunikasi publik.

Pembelajaran dari Pakachun menjadi semakin relevan karena peserta tidak hanya diajak memikirkan bagaimana sebuah konten mendapatkan perhatian, tetapi juga bagaimana seorang ASN tetap membawa identitas dan tanggung jawab sebagai bagian dari institusi pemerintah di ruang digital.

“Konten boleh kreatif, boleh menarik, bahkan boleh viral. Tapi satu hal yang tidak boleh terlewat: etika. Karena ketika kita membawa identitas sebagai ASN, setiap konten yang kita buat bukan hanya mewakili diri sendiri, tetapi juga membawa nama institusi. Jadi, jangan sampai mengejar viralitas, kita justru kehilangan integritas.” ujar ASN yang berasal dari Kementerian Kesehatan RI ini.

Dengan demikian, menjadi kreator bukan sekadar mengejar views dan likes. Lebih jauh, konten dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang benar, membangun kepercayaan, dan memperkenalkan kerja-kerja pemerintah kepada masyarakat dengan cara yang lebih dekat.



Menjaga Jenis Ikan Dilindungi, Memutus Rantai Perdagangan Ilegal Bukan Sekadar Melindungi Spesies, tetapi Menjaga Keseimbangan Laut

Laut Nusantara bukan sekadar hamparan biru yang menjadi sumber penghidupan. Di dalamnya tersimpan kekayaan hayati yang menjadi bagian penting dari keseimbangan ekosistem dan warisan alam Indonesia. Namun, di balik luasnya perairan Indonesia, masih terdapat ancaman terhadap keberadaan jenis-jenis ikan yang dilindungi.

Perdagangan ilegal jenis ikan dilindungi menjadi salah satu tantangan yang terus dihadapi dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Praktik tersebut tidak hanya mengancam keberlangsungan spesies, tetapi juga berpotensi merusak keseimbangan ekosistem serta membuka ruang bagi jaringan perdagangan ilegal.



Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan Ditjen PSDKP, Sahono Budianto, mengatakan bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan jenis ikan dilindungi membutuhkan perhatian serius karena pola pelanggaran semakin beragam.

“Pemanfaatan jenis ikan dilindungi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pengawasan

tidak hanya melihat keberadaan ikannya, tetapi juga bagaimana asal-usul, pemanfaatan, pengangkutan, hingga peredarannya. Di setiap tahapan tersebut terdapat potensi pelanggaran yang harus kita cegah,” ujar Sahono.

Menurutnya, salah satu aspek penting dalam pengawasan adalah memastikan setiap pemanfaatan jenis ikan dilindungi memiliki dokumen dan perizinan yang dipersyaratkan. Keberadaan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) menjadi bagian penting dalam memastikan kegiatan pemanfaatan dan peredaran dapat ditelusuri.

Dokumen tersebut bukan sekadar persyaratan administratif. Lebih jauh, keberadaan dokumen menjadi instrumen untuk memastikan bahwa ikan yang dimanfaatkan memiliki asal-usul yang jelas dan diperoleh melalui kegiatan yang legal.

Modus Semakin Beragam

Perdagangan jenis ikan dilindungi dapat memanfaatkan celah dalam rantai pasok, mulai dari pengumpulan di tingkat lokal hingga pengiriman antardaerah dan perdagangan.

Produk yang berasal dari kegiatan ilegal dapat berupaya disamarkan seolah-olah berasal dari sumber yang sah.

Kondisi tersebut membuat pengawasan tidak cukup hanya dilakukan di laut. Pengawasan juga perlu menasar rantai perdagangan dan distribusi untuk memastikan produk yang beredar dapat ditelusuri asal-usulnya.

“Pengawasan harus melihat seluruh rantai kegiatan. Jangan sampai produk yang awalnya diperoleh secara ilegal kemudian masuk ke dalam rantai perdagangan dan seolah-olah menjadi produk legal. Ketertelusuran menjadi sangat penting,” jelas Sahono.

Ia menambahkan, pengawasan terhadap jenis ikan dilindungi juga membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pasalnya, karakter perdagangan ilegal dapat melibatkan lebih dari satu wilayah dan pelaku. Karena itu, pertukaran informasi dan koordinasi menjadi kunci untuk memutus rantai peredaran dari hulu hingga hilir.





Menjaga Predator, Menjaga Ekosistem

Ancaman terhadap jenis ikan dilindungi bukan hanya persoalan hilangnya satu spesies. Dalam ekosistem laut, setiap jenis memiliki fungsi dan peran masing-masing.

Hilangnya spesies tertentu dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Predator seperti hiu, misalnya, memiliki posisi penting dalam menjaga keseimbangan rantai makanan. Ketika populasinya terus tertekan akibat eksploitasi ilegal, dampaknya dapat menjalar pada ekosistem secara keseluruhan.

Karena itu, pengawasan jenis ikan dilindungi merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan ekosistem laut sekaligus keberlanjutan sumber daya perikanan.

“Yang kita lindungi bukan hanya ikannya, tetapi ekosistem dan keberlanjutan sumber daya. Kalau satu bagian dari ekosistem terganggu, dampaknya bisa dirasakan pada bagian yang lain,” kata Sahono.

Penegakan Hukum hingga Pencegahan

Dalam menangani dugaan pelanggaran, Ditjen PSDKP melakukan langkah pengawasan dan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya tersebut dapat mencakup pemeriksaan, penghentian kegiatan, penyegelan, hingga proses penanganan perkara sesuai karakter pelanggarannya.

Namun, penegakan hukum bukan satu-satunya pendekatan.

Menurut Sahono, pencegahan harus berjalan beriringan dengan pengawasan dan penindakan. Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha menjadi penting agar pemanfaatan jenis ikan dilakukan secara legal dan bertanggung jawab.

“Penindakan memang penting, tetapi pencegahan juga tidak kalah penting. Kita ingin masyarakat memahami bahwa jenis ikan dilindungi bukan komoditas yang bisa dimanfaatkan secara bebas. Ada aturan yang harus dipatuhi karena ada kepentingan yang lebih besar, yaitu keberlanjutan sumber daya dan ekosistem,” tegasnya.

Ke depan, pengawasan juga perlu semakin didukung teknologi dan sistem informasi yang mampu memperkuat ketertelusuran. Integrasi data dan informasi di sepanjang rantai pemanfaatan diharapkan dapat membantu mendeteksi lebih dini potensi pelanggaran sekaligus mempersempit ruang gerak perdagangan ilegal.

Agar Laut Tetap Menjadi Rumah

Melindungi jenis ikan dilindungi pada akhirnya bukan semata-mata tentang menjaga keberadaan satwa tertentu. Lebih dari itu, upaya tersebut merupakan investasi untuk menjaga keseimbangan laut dan memastikan sumber daya kelautan tetap tersedia bagi generasi mendatang.

Laut yang sehat membutuhkan kehadiran setiap spesies di dalamnya. Karena itu, membiarkan satu jenis ikan hilang dari habitatnya berarti mengambil satu bagian dari masa depan ekosistem.

“Kita ingin generasi mendatang tetap dapat melihat kekayaan jenis ikan Indonesia di habitatnya, bukan hanya melalui foto atau cerita. Karena itu, pemanfaatan harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai ketentuan,” pungkas Sahono.

Sebab, menjaga jenis ikan dilindungi bukan sekadar menjaga satwa dari kepunahan. Ini adalah upaya menjaga laut tetap menjadi rumah bagi ikan, bagi nelayan, dan bagi generasi Indonesia yang akan datang.



Stop Bom Ikan, Jangan Jadi Bumerang

Suara ledakan bawah laut itu mungkin hanya berdurasi beberapa detik, tetapi gaungnya mampu membunuh masa depan pesisir hingga berpuluh-puluh tahun ke depan. Di berbagai sudut perairan Nusantara, praktik *destructive fishing* menggunakan bom ikan buatan sendiri masih menjadi jalan pintas yang menggiurkan bagi sebagian nelayan. Menggiurkan, karena dalam hitungan menit, ratusan ikan mengambang tak berdaya di permukaan, siap diraup tanpa perlu bersusah payah mengulur senur pancing. Namun, di balik kemudahan semu itu, ada harga teramat mahal yang sedang dipertaruhkan. Cara tangkap culas ini tak ubahnya melempar

bumerang ke udara suatu saat ia akan kembali dan menghantam mukamu sendiri dengan daya rusak yang jauh lebih dahsyat.

Dampak buruknya tak berhenti di dasar laut, melainkan menjalar hingga ke meja negosiasi internasional. Di era perikanan modern saat ini, dunia tak lagi sekadar bertanya “seberapa banyak ikan yang kamu tangkap?”, melainkan “bagaimana cara kamu menangkapnya?”. Pasar global di Eropa, Amerika, hingga Jepang makin ketat menerapkan standar keberlanjutan dan ketertelusuran (*traceability*). Ikan yang ditangkap dengan cara-cara merusak akan langsung masuk dalam daftar hitam produk *Illegal, Unreported,*



and Unregulated (IUU) Fishing. Praktik bom ikan yang dibiarkan marak di dalam negeri akan menghancurkan reputasi perikanan Indonesia secara keseluruhan. Diplomasi tarif nol persen dan perjuangan mendapatkan sertifikasi eco-label di panggung internasional akan mentok di tembok tebal proteksi dunia jika citra laut kita masih dicemari oleh asap bom.

Menghentikan praktik pemboman ikan adalah ujian kedewasaan kita sebagai bangsa bahari. Ini bukan sekadar tugas aparat penegak hukum untuk berpatroli dengan kapal perang, melainkan panggilan kesadaran bagi seluruh komunitas pesisir. Mengubah pola pikir dari merusak menjadi merawat memang butuh proses, namun itu adalah satu-satunya jalan menuju kemakmuran yang hakiki. Ketika bom mati dan laut kembali bernapas lega, terumbu karang akan kembali menjadi rumah yang hangat



bagi jutaan biota, dan nelayan bisa memanen hasilnya secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Sudah saatnya kita mematikan sumbu peledak itu sekarang juga, sebelum bumerang kehancuran itu benar-benar menumpas habis piring nasi anak-cucu kita sendiri.





KKP Tangkap Kapal Terduga Komplotan Pelaku Bom Ikan di Kepulauan Spermonde

Respons cepat PSDKP setelah mendeteksi ledakan di perairan Spermonde berhasil mengamankan satu kapal beserta lima awak. Penindakan ini kembali menyoroti ancaman *destructive fishing* yang masih menghantui laut Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menangkap satu unit kapal yang diduga terlibat dalam praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di Perairan Kepulauan Spermonde, Provinsi Sulawesi Selatan.

Penindakan dilakukan setelah Tim PSDKP mendeteksi adanya ledakan di perairan tersebut pada Kamis (27/8/2026) sekitar pukul 09.00 WITA. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim



segera bergerak menuju lokasi untuk melakukan pengejaran dan pemeriksaan.

Hasilnya, petugas berhasil mengamankan KM Nurmaulina beserta lima orang awak kapal. Dari pemeriksaan awal, petugas menemukan sekitar 20 kilogram ikan yang diduga merupakan hasil penangkapan menggunakan bahan peledak, serta satu unit kompresor.

Penindakan tersebut terjadi di tengah kembali mengemukanya perhatian publik terhadap maraknya praktik penangkapan ikan menggunakan bom. Sebelumnya, pemberitaan mengenai temuan ilmuwan yang mengungkap adanya ledakan bom di laut Indonesia hingga disebut terjadi rata-rata satu ledakan setiap 62 menit sempat viral di media sosial dan pemberitaan nasional.

Angka tersebut memberikan gambaran betapa seriusnya ancaman destructive fishing terhadap ekosistem laut Indonesia. Setiap ledakan bukan hanya mengejar ikan dalam hitungan menit, tetapi berpotensi meninggalkan kerusakan ekologis yang berlangsung jauh lebih lama.

Kasus Spermonde menunjukkan bahwa ancaman tersebut bukan sekadar angka atau temuan penelitian. Di lapangan, aktivitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak masih ditemukan dan membutuhkan respons pengawasan yang cepat.

Modus Terorganisasi, PSDKP Bergerak Cepat

Direktur Jenderal PSDKP, **Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M.**, mengatakan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dapat dilakukan dengan modus yang melibatkan beberapa kapal dan pembagian tugas secara terorganisasi.



“Praktik penangkapan ikan menggunakan bom dilakukan dengan modus yang melibatkan beberapa kapal secara cepat dan terorganisasi. Satu kelompok bertugas melemparkan bahan peledak dan segera menjauh dari lokasi setelah ledakan terjadi. Sementara kelompok lainnya bertugas mengumpulkan ikan di permukaan maupun dengan penyelaman,” ujar Ipunk dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Menurut Ipunk, pola tersebut membuat pelaku dapat dengan cepat meninggalkan lokasi setelah ledakan. Karena itu, kecepatan respons menjadi salah satu faktor penting dalam pengawasan terhadap praktik *destructive fishing*.

Dalam kasus Spermonde, suara ledakan yang terdeteksi petugas segera ditindaklanjuti. Tim bergerak ke lokasi dan melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil mengamankan KM Nurmaulina beserta lima awak kapal.

Penindakan ini menjadi contoh bagaimana informasi di lapangan dapat diterjemahkan menjadi respons konkret dalam waktu singkat.



Satu Ledakan, Kerusakan yang Panjang

Bagi ekosistem laut, dampak bom ikan tidak berhenti ketika suara ledakan menghilang.

Penggunaan bahan peledak dapat merusak terumbu karang dan habitat berbagai biota laut. Kerusakan tersebut pada akhirnya dapat mengganggu rantai kehidupan di laut serta mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir.

Ipunk menegaskan, penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan bukan hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman serius terhadap ekosistem.

“Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga dapat menimbulkan kerusakan serius terhadap ekosistem laut, khususnya terumbu karang dan habitat ikan,” jelasnya.

Karena itu, KKP akan terus memperkuat pengawasan terhadap praktik destructive fishing, termasuk melalui respons cepat terhadap informasi mengenai aktivitas penangkapan ikan yang merusak.

Kapal dan Lima Awak Diamankan

Sebagai tindak lanjut penindakan, KM Nurmaulina beserta lima orang awak kapal, ikan hasil penangkapan, dan satu unit kompresor telah diamankan ke Satwas SDKP Makassar.

Seluruhnya akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan proses permintaan keterangan untuk mendalami dugaan pelanggaran serta memastikan rangkaian aktivitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang terjadi di wilayah tersebut.

Penanganan perkara selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi KKP, penindakan ini bukan semata-mata tentang mengamankan kapal dan pelaku. Lebih jauh, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga ruang laut agar tetap produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dari Viral Menjadi Kesadaran Bersama

Fenomena yang sebelumnya ramai diberitakan mengenai frekuensi ledakan bom di laut Indonesia seharusnya tidak berhenti sebagai angka yang viral.

la perlu menjadi alarm bersama. Sebab di balik setiap ledakan terdapat ekosistem yang berpotensi rusak, habitat yang terancam, dan masa depan nelayan yang dipertaruhkan.

Karena itu, pengawasan tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat. Masyarakat, khususnya nelayan, memiliki posisi penting sebagai mata dan telinga pengawasan di laut.

“KKP tidak akan memberikan ruang bagi praktik penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut. Pengawasan akan terus dilakukan dan setiap informasi dari masyarakat akan menjadi bagian penting dalam memperkuat respons di lapangan,” tegas Ipunk.

KKP mengajak masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan aktivitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak maupun praktik penangkapan ikan destruktif lainnya.

Laut Indonesia terlalu berharga untuk dipanen dengan cara yang menghancurkan rumah bagi ikan itu sendiri.

Penangkapan KM Nurmaulina di Kepulauan Spermonde menjadi pengingat bahwa di balik luasnya laut Indonesia, masih ada ancaman yang harus terus diawasi.

Memburu hingga ke Akar Komplotan

Direktur Jenderal PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M., menegaskan penindakan di Spermonde tidak akan berhenti pada pengamanan kapal dan awak yang berada di lapangan. KKP akan mendalami keterkaitan para pihak yang terlibat untuk mengungkap jaringan praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak tersebut secara menyeluruh.

“Kami tidak akan berhenti di sini. Kami akan ungkap sampai ke akar-akarnya. Kalau memang ada komplotan atau jaringan yang terlibat, akan kami telusuri dan tindak sesuai ketentuan hukum,” tegas Ipunk.

Menurutnya, dugaan modus yang melibatkan beberapa kapal menunjukkan bahwa praktik destructive fishing dapat dilakukan secara

terorganisasi dengan pembagian peran. Karena itu, penanganan perkara perlu dilakukan secara menyeluruh agar tidak hanya berhenti pada pelaku yang ditemukan di lapangan, tetapi juga mengungkap pihak-pihak lain yang diduga berada di balik aktivitas tersebut.

Langkah ini menjadi penting untuk memberikan efek jera sekaligus memutus mata rantai praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang berpotensi merusak ekosistem laut.

“KKP tidak akan memberikan ruang bagi praktik penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut. Pengawasan akan terus dilakukan dan setiap informasi dari masyarakat akan menjadi bagian penting dalam memperkuat respons di lapangan,” tegas Ipunk.

Satu ledakan mungkin hanya berlangsung beberapa detik. Namun kerusakan yang ditinggalkannya dapat bertahan jauh lebih lama. Karena itu, ketika alarm berbunyi, PSDKP harus bergerak.

Laut dijaga, ikan lestari, nelayan tetap berdaya.





Tujuh Hari Menembus Badai, KP. ORCA 01 dan KP. ORCA 05 Selamatkan Dua Kapal di Samudra Pasifik

Bukan hanya soal menangkap kapal pelanggar, kapal pengawas perikanan juga hadir ketika keselamatan manusia di laut berada dalam ancaman. Misi penyelamatan dua kapal perikanan milik PT Sumber Mestika Davindo menjadi salah satu gambaran bagaimana kapal pengawas perikanan menjalankan fungsi kemanusiaannya di tengah kondisi laut yang tidak bersahabat.

Peristiwa bermula pada 13 Agustus 2026, ketika KM Sarana Sumber Mestika mengalami kerusakan mesin saat beroperasi di perairan utara Sulawesi. Kerusakan tersebut membuat kapal tidak dapat melanjutkan pelayaran secara normal dan berada dalam kondisi rentan terhadap arus dan gelombang laut.

Empat hari kemudian, tepatnya 17 Agustus 2026, KM Sinar Mestika Mulia diberangkatkan

menuju lokasi KM Sarana Sumber Mestika untuk memberikan pertolongan. Namun, upaya penyelamatan tersebut justru menghadapi persoalan baru.

Setibanya di lokasi pada 19 Agustus 2026, KM Sinar Mestika Mulia juga mengalami kerusakan mesin. Dua kapal akhirnya berada dalam kondisi yang sama-sama mengalami gangguan mesin dan terombang-ambing di laut.

Situasi tersebut menjadi semakin serius karena kedua kapal berada jauh dari daratan, di kawasan perairan Samudra Pasifik, WPPNRI 716, wilayah perairan yang dikenal memiliki kondisi laut yang dinamis.

Menembus Laut Lepas

Pertolongan kemudian datang dari Kapal Pengawas (KP) Orca 01 dan KP Orca 05. Pada 23 Agustus 2026 pukul 12.30 WITA, kedua kapal pengawas berhasil menemukan dan melakukan penarikan terhadap KM Sarana Sumber Mestika dan KM Sinar Mestika Mulia.

Proses evakuasi dilakukan pada posisi sekitar 04°56.497' LU – 129°41.111' BT, di perairan utara Sulawesi, Samudra Pasifik.

Namun, membawa dua kapal yang mengalami kerusakan mesin menuju daratan bukan pekerjaan mudah. KP Orca 01 dan KP Orca 05 harus menarik kedua kapal dalam perjalanan panjang yang berlangsung selama tujuh hari.

Dalam perjalanan tersebut, rombongan menghadapi cuaca buruk dan badai. Gelombang laut, angin kencang, serta kondisi dua kapal yang tidak dapat bergerak dengan tenaga mesinnya sendiri membuat proses penarikan membutuhkan kewaspadaan dan ketelitian tinggi.

Di tengah kondisi tersebut, kapal pengawas perikanan tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, tetapi juga menjalankan misi penyelamatan dan memastikan kapal yang mengalami kondisi darurat dapat keluar dari situasi berbahaya.

Tujuh Hari Kemudian, Selamat Sampai Bitung

Setelah menempuh perjalanan panjang selama tujuh hari, upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil.

Pada Sabtu, 29 Agustus 2026, KM Sarana Sumber Mestika dan KM Sinar Mestika Mulia berhasil dibawa menuju Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung dalam kondisi selamat.

Kisah ini menjadi pengingat bahwa laut bukan hanya ruang aktivitas ekonomi dan pengawasan, tetapi juga medan yang penuh risiko. Ketika kerusakan mesin membuat kapal kehilangan kemampuan untuk bermanuver, pertolongan di laut dapat menjadi penentu antara keselamatan dan bahaya yang lebih besar.

Keberhasilan KP Orca 01 dan KP Orca 05 menarik dua kapal tersebut selama tujuh hari, melewati cuaca buruk dan badai, menunjukkan bahwa kapal pengawas perikanan hadir bukan hanya untuk menjaga sumber daya kelautan dan perikanan, tetapi juga untuk memberikan pertolongan ketika keselamatan pelaku usaha perikanan berada dalam situasi darurat.

Di balik keberhasilan penyelamatan dua kapal tersebut, terdapat peran penting Vessel Monitoring System (VMS). Di tengah luasnya perairan Samudra Pasifik, keberadaan VMS menjadi salah satu instrumen yang membantu memberikan informasi mengenai posisi kapal yang mengalami kondisi darurat.

Informasi posisi kapal yang terpantau melalui VMS menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran situasi bagi aparat pengawasan. Dengan mengetahui posisi kapal, proses koordinasi dan penentuan langkah pertolongan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terarah.

Hal ini menjadi semakin penting mengingat kedua kapal berada jauh dari daratan dan mengalami kerusakan mesin, sehingga tidak dapat melanjutkan pelayaran secara normal. Dalam kondisi seperti itu, informasi posisi kapal menjadi sangat krusial untuk memastikan pertolongan dapat diarahkan ke lokasi yang tepat.



**Dimana Ada
Nelayan,
Disitu Pasti Ada
PSDKP**



Manfaat VMS terhadap keselamatan pelayaran kapal nelayan juga dirasakan oleh KM Berkah Rizqi (85 GT). Kapal nelayan asal Rembang, Jawa Tengah, yang dilaporkan hampir tenggelam di perairan Laut Jawa. Usai mendapat informasi darurat pada Selasa (9/12) langsung oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Dr. Pung Nugroho Saksono atau Ipunk, kemudian melakukan komunikasi video dengan nakhoda kapal, Suyadi, untuk memastikan kondisi kapal yang tengah beroperasi di Laut Jawa, tepatnya di perairan selatan Pulau Kalimantan.

Dalam situasi seperti ini, penanganan cepat dilakukan dengan menghubungi kapal nelayan terdekat, kemudian memerintahkan kapal pengawas di sekitar lokasi menuju ke lokasi memberikan pertolongan. Selain menggerakkan kapal pengawas terdekat, tim Pusat Pengendalian (Pusdal) KKP juga menghubungi KM Kurnia Tawakal (80 GT) sebagai kapal terdekat untuk memberikan bantuan awal.

"Inilah manfaat nyata VMS dengan adanya VMS di kapal nelayan maka akan mempermudah kami melakukan pertolongan cepat kepada nelayan dalam kondisi darurat di laut," jelas Ipunk.

KP Orca 06 ikut dikerahkan pada Rabu (10/12) untuk memberikan bantuan kebutuhan pokok, makanan, serta logistik kepada para ABK KM Berkah Rizqi.

Dititik inilah PSDKP tak lagi sekadar dipandang sebagai lembaga penegak hukum dengan kapal patroli yang sigap menghalau pencuri ikan. Namun bagi para nelayan tradisional, PSDKP adalah tangan pelindung yang siap terulur saat marabahaya datang menerpa. Dari aksi penyelamatan darurat (*Search and Rescue*) saat kapal nelayan mengalami kecelakaan laut, pengawalan navigasi di zona rawan *conflict*, hingga pendampingan hukum ketika nelayan lokal tanpa sengaja melintas batas negara karena terdorong arus. Kehadiran PSDKP di tengah samudra menghadirkan rasa aman yang tak ternilai harganya.

Ketika siren kapal patroli PSDKP mengudara di sela deru ombak, ada lega yang membuncih di dada para nelayan. Ia adalah simbol bahwa di balik luas dan gelapnya samudra, ada penjaga samudera yang selalu bersiaga pasang badan demi keselamatan dan kesejahteraan mereka. Sebab melindungi nelayan bukan hanya soal menjaga keselamatan jiwa di laut, melainkan cara paling nyata untuk merawat kedaulatan dan memastikan api dapur di rumah-rumah pesisir tetap menyala.



Bukan Sekadar Mengawasi, VMS PSDKP Jadi Mata Penolong Nelayan di Laut

Teknologi pemantauan kapal atau *Vessel Monitoring System (VMS)* yang digunakan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) tidak hanya berfungsi untuk memastikan aktivitas kapal perikanan berjalan sesuai ketentuan. Di tengah luasnya perairan Indonesia, data VMS juga menjadi mata yang membantu petugas mendeteksi kapal nelayan yang membutuhkan pertolongan.

Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, pemantauan melalui VMS telah mendukung upaya pertolongan terhadap sedikitnya **27 kapal nelayan**, baik yang langsung ditangani oleh **Kapal Pengawas Ditjen PSDKP** maupun yang mendapat bantuan dari **kapal nelayan terdekat**.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi, MM mengatakan sepanjang Januari hingga Agustus 2026, tercatat puluhan kapal nelayan mendapatkan pertolongan, baik secara langsung oleh Kapal Pengawas Ditjen PSDKP maupun melalui kapal-kapal terdekat. "Ini menunjukkan bahwa pengawasan dan keselamatan di laut merupakan satu kesatuan. Kami ingin memastikan bahwa nelayan tidak hanya merasa diawasi, tetapi juga merasa terlindungi" ujar Ipunk.

Dari data tersebut, **13 kapal nelayan** mendapatkan pertolongan dengan dukungan Kapal Pengawas Ditjen PSDKP, sementara **14 kapal lainnya** memperoleh pertolongan dari kapal-kapal terdekat yang berada di sekitar lokasi kejadian.

“Kami juga mengapresiasi para nelayan dan pengguna jasa pelayaran yang dengan cepat memberikan pertolongan kepada sesama ketika berada di laut. Semangat saling membantu ini sangat penting. Negara hadir melalui teknologi, Kapal Pengawas, dan petugas kami, tetapi kepedulian antarsesama pengguna laut juga menjadi kekuatan yang tidak kalah penting.” ujar Ipunk

Respons tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan di laut tidak berhenti pada penindakan terhadap pelanggaran. Infrastruktur pengawasan yang dimiliki Ditjen PSDKP juga dapat berperan dalam memastikan kapal nelayan yang mengalami kendala atau membutuhkan bantuan dapat segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti.

Kapal Pengawas PSDKP Turun Tangan

Sejumlah kejadian menunjukkan bagaimana informasi dari sistem pemantauan dapat ditindaklanjuti oleh Kapal Pengawas yang berada di wilayah operasi.

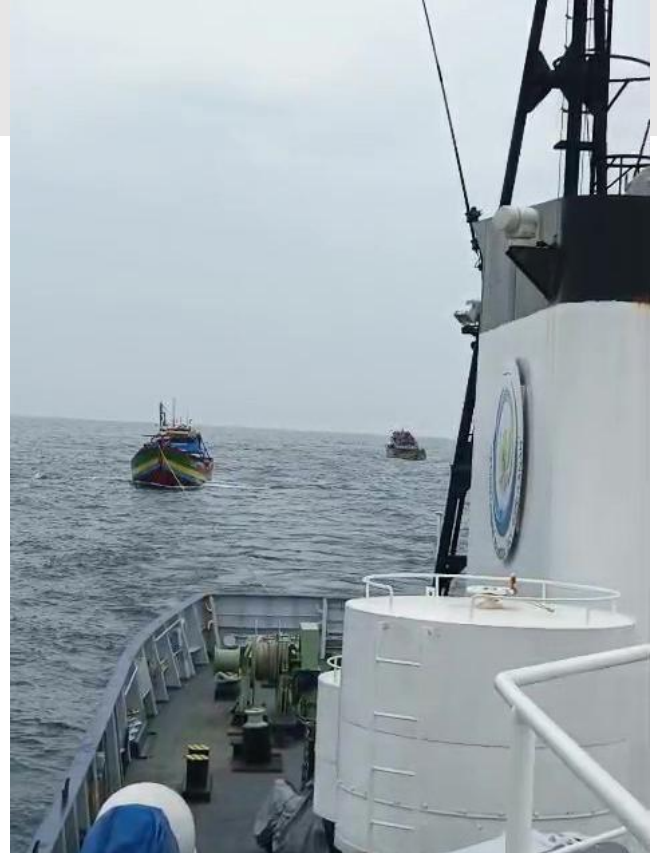
Pada 25 Februari 2026, misalnya, KM Wahana Nilam 3 dan KM Barokah mendapatkan pertolongan dari KP Orca 06 dan berhasil dalam kondisi aman.

Selanjutnya, pada 10 Maret 2026, KM Makmur Jaya mendapatkan bantuan dari KP Hiu Macan 05 dan KP Hiu 17. Pertolongan juga diberikan kepada KM Annisa Baru oleh KP Barakuda 02 pada 15 April, KM Vares oleh KP Hiu 12 pada 20 April, serta KM Merpati Bunda II oleh KP Hiu 01 pada 27 April 2026.

Pada akhir April, tepatnya 28 April 2026, KM Kembang Joyo 4 juga mendapat pertolongan dari KP Hiu Macan Tutul 02.

Respons serupa terus berlangsung pada bulan-bulan berikutnya. KM Nialagi 02 ditolong KP Hiu Macan 03 pada 9 Juni, sementara KM Lancar Makmur Jaya mendapat pertolongan KP Hiu 12 pada 16 Juli 2026.

Pada 25 Juli, KM Anugerah Laut 3 juga mendapat respons dari KP Hiu Macan 04. Kemudian pada Agustus, bantuan diberikan kepada KM Doa Ibu oleh KP Hiu 06, serta kepada KM Sarana Sumber



Mestika dan KM Sinar Mestika Mulia oleh KP Orca 01 dan KP Orca 05.

Rangkaian pertolongan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan Kapal Pengawas di laut memiliki arti penting, bukan hanya dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan, tetapi juga dalam memberikan respons ketika terdapat kapal nelayan yang membutuhkan bantuan.

Kapal Terdekat, Pertolongan Tercepat

Selain mengandalkan Kapal Pengawas, mekanisme pemantauan juga memungkinkan respons pertolongan dilakukan melalui kapal yang berada paling dekat dengan lokasi kejadian.

Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 14 kejadian pertolongan yang melibatkan kapal nelayan terdekat.

Pada 9 Januari 2026, misalnya, KM Harta Mulia 04 mendapatkan pertolongan dari KM Sumber Abadi dan KM Sumber Rejeki. Beberapa hari kemudian, pada 17 Januari, Kapal Hindia mendapat bantuan dari kapal nelayan yang berada di sekitarnya.

Pertolongan juga diberikan kepada KM Puji Manunggal Sejati oleh kapal Pelni pada 28 Januari. Sementara pada 28 April, KM Anugerah Bhakti mendapat bantuan dari Trans Mitramas 25.



Pada Mei, respons pertolongan semakin terlihat. KM Naili XX ditolong oleh KM Sri Dewi 2P, KM MM A1, dan KM Jimmy Wijaya-7 pada 6 Mei. Sehari kemudian, KM Putra Sukses Baru mendapat pertolongan dari KM Berkah Melimpah II.

Pada 10 Mei, KM Kembang Joyo 4 kembali tercatat mendapatkan bantuan, kali ini dari KM Varia Jadid 2, KM Sriwijaya Baru, dan KM Sumber Abadi.

Pertolongan berlanjut kepada KM Bintang Moro oleh KM Sinar Pelangi Jaya 8 pada 17 Mei dan KM Baruna Samudra V oleh KM Sinar Luas I pada 26 Mei.

Memasuki Juni dan Juli, bantuan juga diberikan kepada KM Mujarob Sejati, KM Karya Makmur VII, KM Sinar Mattoangin 05, KM Jaya Indah Mulya, dan KM Mekar Jaya Bahari.

Sebagian besar kapal yang mendapatkan pertolongan tersebut tercatat dalam kondisi aman setelah memperoleh bantuan.

VMS: Teknologi Pengawasan yang Menghadirkan Rasa Aman

Laut Indonesia yang luas membuat kecepatan dalam memperoleh informasi menjadi salah satu kunci keselamatan. Dalam kondisi tertentu, jarak dan keterbatasan komunikasi dapat menjadi tantangan bagi nelayan yang mengalami persoalan di laut.

Di sinilah pemanfaatan VMS memiliki nilai strategis. Data pergerakan kapal yang diterima dalam sistem pemantauan dapat menjadi informasi awal bagi petugas untuk mengetahui posisi kapal dan menentukan langkah respons yang diperlukan.

Direktur Jenderal PSDKP, Dr Pung Nugroho SaksonoA.Pi., M.M mengatakan bahwa VMS bukan semata-mata instrumen untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan kapal perikanan. Lebih dari itu, VMS merupakan bagian dari kehadiran negara di laut. "Ketika dari sistem pe-

mantauan terdeteksi kapal yang membutuhkan pertolongan, informasi tersebut menjadi dasar bagi kami untuk segera mengambil langkah dan memberikan respons.”

Ketika sebuah kapal membutuhkan bantuan, keberadaan Kapal Pengawas yang sedang beroperasi di sekitar lokasi dapat menjadi faktor penting untuk mempercepat pertolongan. Apabila Kapal Pengawas berada cukup jauh, kapal nelayan lain yang berada di sekitar lokasi dapat menjadi pihak pertama yang memberikan bantuan.

Dengan demikian, pengawasan berbasis teknologi tidak semata-mata berbicara mengenai **menemukan pelanggaran**, tetapi juga mengenai **menemukan mereka yang membutuhkan pertolongan**.

Dari Pengawasan untuk Keselamatan

Catatan pertolongan sepanjang Januari s/d Agustus 2026 menjadi gambaran bahwa aktivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan memiliki dimensi yang lebih luas.

Kapal Pengawas Ditjen PSDKP tidak hanya hadir untuk memastikan laut Indonesia bebas dari praktik *illegal fishing*. Kapal-kapal tersebut juga menjadi bagian dari kehadiran negara di laut termasuk ketika nelayan membutuhkan bantuan.

Sementara itu, kapal-kapal nelayan yang memberikan pertolongan kepada sesama juga menunjukkan kuatnya semangat gotong royong di laut. Dalam situasi darurat, kapal terdekat



sering kali menjadi pertolongan pertama sebelum bantuan lain tiba.

Teknologi VMS pada akhirnya bukan sekadar titik-titik kapal yang bergerak di layar pusat pemantauan. Di balik setiap titik tersebut terdapat manusia, aktivitas, dan cerita.

Dan ketika sebuah titik membutuhkan bantuan, pengawasan berubah menjadi kepedulian.

“Bagi kami, setiap kapal yang berhasil ditolong bukan sekadar angka dalam laporan. Di dalamnya ada nelayan, ada keluarga yang menunggu di darat, dan ada harapan agar mereka dapat kembali dengan selamat. Karena itu, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan harus selalu berorientasi pada perlindungan, keselamatan, dan kebermanfaatan bagi masyarakat.” ujar Ipunk.

Karena menjaga laut bukan hanya tentang memastikan aturan dipatuhi, tetapi juga memastikan mereka yang mencari nafkah di laut dapat kembali dengan selamat.





KKP Bangun 10 Kapal Pengawas Untuk Perkuat Laut Natuna Utara

Laut Natuna Utara bukan sekadar bentangan air biru di ujung utara Nusantara. Ia adalah garis depan kedaulatan, halaman depan rumah kita, sekaligus ladang emas yang tak pernah sepi dari incaran kapal-kapal asing pencuri ikan. Di wilayah yang kaya akan cadangan tuna dan komoditas perikanan bernilai tinggi ini, gelombang ombak yang ganas kerap berpadu dengan tingginya tensi kerawanan perbatasan. Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah tegas dan strategis: membangun 10 unit kapal pengawas baru yang dirancang khusus untuk mengawal setiap jengkal perairan Natuna Utara.

Langkah KKP menghadirkan armada baru ini bukan sekadar penambahan alutsista di atas kertas, melainkan pesan eksplisit bagi panggung maritim regional. Kapal-kapal pengawas modern ini dibekali dengan daya jelajah tinggi, kecepatan responsif, serta teknologi pemantauan canggih untuk menembus ombak besar Natuna yang terkenal ganas. Kehadirannya akan secara drastis memperkuat intensitas patroli dan memperpendek waktu tanggap (response time) saat mendeteksi pergerakan kapal-kapal ilegal. Dengan perkuatan ini, celah sempit yang selama ini dimanfaatkan para pencuri ikan untuk mengeruk kekayaan laut Indonesia akan tertutup rapat.

Namun, dampak dari kehadiran 10 kapal pengawas ini melangkah jauh melampaui angka penangkapan kapal ilegal. Di panggung internasional, armada patroli yang tangguh adalah modal diplomasi yang sangat berharga. Ketika KKP mampu membuktikan ketegasan penegakan hukum dan efektivitas pengelolaan wilayah perairan nasional melalui ketersediaan sarana yang memadai, posisi tawar Indonesia dalam perundingan batas wilayah dan hak perikanan di kawasan regional akan melesat tajam. Negara-negara tetangga dan pelaku industri global akan melihat Indonesia sebagai bangsa yang tak hanya kaya sumber daya, tetapi juga sangat berdaya dalam menjaga asetnya.

Bagi para nelayan lokal di Natuna, hadirnya benteng-benteng baru ini adalah hembusan angin segar yang menghadirkan rasa tenang. Selama ini, para nelayan tradisional kerap harus mengurut dada saat bertatap muka dengan kapal asing berukuran raksasa yang menggunakan alat tangkap merusak. Kini, dengan deru mesin 10 kapal pengawas KKP yang siap pasang badan di garis depan, para nelayan tak lagi merasa bertarung sendirian di tengah samudra. Kedaulatan negara benar-benar hadir melindungi mereka, memastikan bahwa setiap ekor ikan yang berenang di Laut Natuna Utara dipanen untuk kesejahteraan rakyat sendiri, bukan dijarah oleh bangsa lain.





COACHING CLINIC MENEMBAK DI BATAM DAN MANADO

Menajamkan Bidikan, Meneguhkan Pengabdian

Di bawah terik matahari Batam yang menyengat dan hembusan angin pesisir Manado yang kencang, letupan tembakan beruntun memecah keheningan lapangan tembak. Kelongsong peluru tembaga berhamburan, jatuh gemerincing di atas tanah basah. Di balik asap tipis mesiu yang merebak di udara, mata-mata tajam para personel Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) fokus menatap satu titik: pusat sasaran tembak.

Kegiatan latihan dan penyegaran menembak yang digelar secara serentak di dua gerbang strategis Nusantara ini bukan sekadar rutinitas penjelas dahaga ketangkasan, melainkan ritual penting untuk mengasah refleks, presisi, dan keberanian para penjaga samudra.

Batam dan Manado bukanlah titik acak di peta perairan Indonesia. Batam berdiri kokoh sebagai benteng pertahanan di Selat Malaka jalur pelayaran terpadat sekaligus paling rawan di dunia—sementara Manado menjadi garda terdepan yang berhadapan langsung dengan dinamika Samudra Pasifik dan Laut Sulawesi. Di kedua wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi ini, para petugas PSDKP kerap harus berhadapan dengan skenario terburuk di tengah laut lepas: perlawanan fisik dari kapal pencuri ikan asing, potensi kecelakaan di garis batas, hingga situasi darurat yang menuntut keputusan secepat kilat. Latihan menembak ini adalah tempat di mana insting bertahan hidup dan ketegasan penegakan hukum ditempa hingga sekeras baja.

Namun, di balik kerasnya dentuman peluru, menembak bagi aparat PSDKP pada hakikatnya



adalah latihan mengendalikan diri. Setiap tarikan pelatuk membutuhkan ketenangan jiwa, fokus yang tak tergoyahkan, serta perhitungan yang matang. Senjata api di tangan aparat bukan instrumen untuk menakut-nakuti, apalagi memamerkan kekuasaan, melainkan amanah negara yang hanya boleh digunakan demi melindungi keselamatan jiwa dan menjaga kedaulatan laut dari ancaman kejahatan maritim. Melalui penyegaran ini, kapasitas teknis para personel dipoles kembali agar setiap tindakan yang diambil di tengah gelombang selalu terukur, akurat, dan berlandaskan hukum.

Coaching clinic ini mengirimkan pesan kuat ke seluruh penjuru samudra. Bagi para nelayan Indonesia, bidikan yang makin tajam dari para petugas adalah jaminan rasa aman saat mereka mengarungi laut untuk mencari nafkah. Sementara bagi para pelaku perikanan ilegal yang berniat merampok kekayaan laut Nusantara, letupan peluru di Batam dan Manado adalah peringatan keras bahwa penjaga laut Indonesia selalu siap, tangguh, dan tak pernah ragu pasang badan demi menegakkan kedaulatan bangsa.





VIRAL DIJUAL, KKP TURUN TANGAN Kegiatan Di Menjangan Kecil Dihentikan Sementara

Kabar mengenai penjualan Pulau Menjangan Kecil di Kepulauan Karimunjawa yang sempat viral di media sosial melalui akun Instagram @thefind_luxrealestate mendapat atensi cepat dan tegas dari pemerintah. Tim Polsus PWP3K Direktorat Jenderal PSDKP bergerak cepat melakukan verifikasi dan inspeksi langsung ke lapangan pada 25 hingga 26 Agustus 2026.

Berdasarkan hasil pemetaan awal melalui data digitasi *bhumi.atrbpn*, Pulau Menjangan Kecil tercatat memiliki luas daratan sekitar 50,47 hektare (504.679 m²) dengan kepemilikan yang terbagi ke dalam 17 Sertifikat Hak Milik (SHM). Mengingat kawasan ini berada penuh di bawah naungan Balai Taman Nasional Karimunjawa, tim PSDKP berkoordinasi erat dengan pihak Balai guna memastikan batas wilayah tata ruang laut serta perlindungan kawasan konservasi.

Direktur Jenderal PSDKP Dr Pung Nugroho Saksono, A.Pi, MM mengatakan, informasi yang berkembang di media sosial menjadi salah

satu bahan bagi pemerintah untuk melakukan verifikasi lapangan. Pemerintah memastikan isu yang menyangkut pemanfaatan pulau-pulau kecil tidak berhenti pada ruang digital, tetapi ditindaklanjuti melalui pengawasan langsung.

“Negara tidak hanya melihat apa yang viral, tetapi memastikan fakta di lapangan. Pulau-pulau kecil Indonesia harus dikelola sesuai hukum, menjaga kepentingan nasional, dan tidak boleh dimanfaatkan secara sembarangan,” tegas Ipunk.

Tim juga melakukan koordinasi dengan Balai Taman Nasional Karimunjawa karena Pulau Menjangan Kecil berada dalam wilayah Taman Nasional Karimunjawa.

Koordinasi dilakukan untuk memastikan pengawasan terhadap pemanfaatan pulau kecil tetap memperhatikan aspek tata ruang, pengelolaan kawasan konservasi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di lapangan, tim menemukan adanya kegiatan pemanfaatan pada area sekitar 44,5 hektare. Pada area tersebut terdapat Menjangan Resort,

fasilitas jetty, serta kegiatan pemeliharaan biota laut seperti ikan hiu, kerapu, dan bintang laut yang dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata.

Temuan tersebut selanjutnya akan didalami oleh Ditjen PSDKP untuk memastikan legalitas pemanfaatan pulau kecil dan ruang laut.

Seluruh aktivitas usaha dan pemeliharaan biota tersebut diduga kuat berjalan tanpa mengantongi izin resmi. Pengelola belum memegang Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil (untuk pulau di bawah luas 100 km²) maupun Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Selain itu, pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan masuk dalam daftar Appendix CITES untuk kepentingan pariwisata tersebut juga terindikasi tidak dilengkapi izin legal yang sah.

Untuk memastikan proses pemeriksaan dapat berjalan secara tertib, Ditjen PSDKP telah melakukan pemasangan Papan Penghentian Sementara Kegiatan di lokasi Menjangan Resort.

Penghentian sementara dilakukan sebagai langkah pengawasan terhadap kegiatan yang menjadi objek pemeriksaan sampai proses verifikasi dan klarifikasi selesai dilakukan.

Selanjutnya, pengelola akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan mengenai legalitas seluruh kegiatan yang dilakukan di lokasi.

“Kami tidak ingin mengambil kesimpulan sebelum seluruh proses pemeriksaan selesai. Temuan lapangan ini akan kami klarifikasi kepada pengelola, termasuk dokumen legalitas pemanfaatan pulau, ruang laut, fasilitas jetty, dan pemanfaatan jenis ikan yang ada di lokasi,” ujar Ipunk.

Ditjen PSDKP akan mendalami sedikitnya tiga aspek, yaitu legalitas pemanfaatan pulau kecil, legalitas pemanfaatan ruang laut, serta legalitas pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk *Appendix CITES*.

Selain melakukan pengawasan, tim Ditjen PSDKP juga melakukan pengibaran Bendera Merah Putih di Pulau Menjangan Kecil.

Pengibaran bendera tersebut menjadi simbol kehadiran negara di pulau kecil Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa Pulau Menjangan Kecil merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Bendera Merah Putih yang kami kibarkan adalah pesan sederhana tetapi kuat: negara hadir di pulau-pulau kecil Indonesia. Pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan pemanfaatannya sesuai hukum dan kepentingan nasional,” tegas Ipunk.

KKP memastikan pengawasan terhadap pulau-pulau kecil akan terus diperkuat, termasuk melalui penindakan terhadap kegiatan yang terbukti melanggar ketentuan setelah melalui proses pemeriksaan.

Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk terus menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Sebagai bentuk penegakan kedaulatan dan respons langsung atas isu penjualan pulau yang meresahkan publik, tim gabungan menggelar aksi Pengibaran Bendera Merah Putih di Pulau Menjangan Kecil. Langkah simbolis ini mempertegas kehadiran negara dalam menjaga setiap jengkal wilayah Kepulauan Nusantara dari klaim kepemilikan pihak asing.

“Bendera Merah Putih yang kami kibarkan adalah pesan sederhana tetapi kuat: negara hadir di pulau-pulau kecil Indonesia. Pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan pemanfaatannya sesuai hukum dan kepentingan nasional,” tegas Ipunk.

KKP memastikan pengawasan terhadap pulau-pulau kecil akan terus diperkuat, termasuk melalui penindakan terhadap kegiatan yang terbukti melanggar ketentuan setelah melalui proses pemeriksaan.

Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk terus menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.



Kolaborasi DITJEN PSDKP Dengan Lima Pemerintah Daerah

Direktorat Jenderal PSDKP bergandengan tangan bersama empat pemerintah daerah, menyatukan ikhtiar demi menjaga kehormatan air dan tanah. Lebih dari sekadar jalinan birokrasi, bentangan kerja sama ini adalah ikrar suci untuk merawat bahari yang rihat, serta memastikan setiap helai jala nelayan kita bernapas lega di rumahnya sendiri.

PSDKP DAN MALUKU UTARA

Langkah Kerjasama diawali dengan Provinsi Maluku Utara, kita ketahui perairan Kie Raha ini adalah surga tersembunyi yang menyimpan kekayaan bahari melimpah, sekaligus salah satu jalur paling strategis di kawasan timur Nusantara. Dengan bentangan laut yang luas dan

ribuan pulau yang tersebar, wilayah ini tak hanya menjadi lumbung ikan nasional, tetapi juga sangat rentan terhadap ancaman pencurian ikan ilegal, perusakan ekosistem karang, dan pelanggaran wilayah. Menyadari kompleksitas tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan resmi menjalin kemitraan strategis dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Selasa, 4 Agustus 2026.

Dokumen penting ini ditandatangani langsung oleh Direktur Jenderal PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono, bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, untuk jangka waktu lima tahun ke depan.



Langkah kolaboratif ini dirancang guna meningkatkan keterpaduan, efektivitas, dan efisiensi pengawasan perairan laut Maluku Utara hingga batas 12 mil laut. Ruang lingkup kerja sama mencakup empat pilar utama, yakni pelaksanaan operasi pengawasan terpadu, penanganan pelanggaran hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimasi pemanfaatan sarana dan prasarana pengawasan. Melalui pilar-pilar ini, kedua belah pihak berkomitmen memadukan personel, armada kapal pengawas, hingga sarana penunjang seperti ruang pemeriksaan dan tempat penyimpanan barang bukti guna menghadirkan penegakan hukum serta sanksi administratif yang lebih tegas.

Sinergi ini membagi peran secara proporsional antara pemerintah pusat dan daerah. Ditjen PSDKP bertanggung jawab memberikan bantuan teknis, armada patroli, serta menyelenggarakan bimbingan teknis bagi Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyokong dari aspek penganggaran daerah, penyediaan fasilitas lahan dan bangunan pendukung, hingga penyampaian data perizinan usaha.

Tak kalah penting, kedua pihak juga melibatkan pilar terdepan di tingkat tapak dengan membina Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dan rutin melakukan sosialisasi aturan. Melalui evaluasi berkala yang digelar setidaknya dua kali dalam setahun, kesepakatan ini diharapkan menjadi perisai nyata dalam melindungi kekayaan bahari Maluku Utara demi kesejahteraan masyarakat pesisir.

PSDKP DAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Selain Maluku Utara, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Utara resmi memadukan langkah.

Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 1696/DJPSDKP.1/KS.320/VII/2026 dan 000.3.7.1/790/B.BPP/DKP. Kesepakatan diresmikan di Jakarta oleh Sekretaris Ditjen PSDKP Saiful Umam dan Kepala DKP Kaltara Syahrullah Mursalin. Kemitraan ini berlaku selama lima tahun ke depan hingga 2030, mengusung misi besar memperkuat sistem pengawasan perairan, menegakkan hukum, serta menjamin pemanfaatan laut secara tertib dan berkelanjutan.

Kalimantan Utara memiliki posisi geopolitik dan maritim yang krusial. Melalui kerja sama ini, pusat dan daerah menyatukan barisan untuk melancarkan operasi pengawasan bersama, pemantauan perizinan berusaha berbasis risiko, hingga penanganan pencemaran laut secara terpadu.

Namun, menjaga perairan tidak hanya menjadi tugas aparat. Komitmen ini turut mendorong peran aktif Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di tingkat lokal. Melalui pendampingan teknis dan pembinaan, masyarakat pesisir difasilitasi untuk menjadi mata dan telinga dalam menjaga wilayah perairan mereka sendiri dari praktik *illegal fishing*.



Guna menunjang efektivitas lapangan, kedua pihak menyepakati pertukaran data perizinan dan pelanggaran, pemanfaatan sarana-prasarana bersama, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Para pengawas perikanan, Polsus PWP3K, serta PPNS Perikanan akan dibekali pelatihan berkelanjutan agar makin sigap menghadapi dinamika di lapangan.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi tata kelola laut Kalimantan Utara yang transparan, aman, dan memberi manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat nelayan setempat.

Penegakan Hukum dan Penguatan Kapasitas

Sinergi ini juga mempertegas penanganan pelanggaran hukum di laut. Kerja sama mencakup koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan baik penjatuhan sanksi administratif maupun proses penyidikan serta penyelenggaraan forum Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Pidkor/TPKP) di tingkat daerah.

PSDKP dan PROVINSI BENGKULU

Garis pantai Bengkulu yang membentang menatap Samudra Hindia kini menyimpan harapan baru. Di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026, sebuah dokumen penting resmi ditandatangani. Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pengawasan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menjadi fondasi kokoh kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) KKP dan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Langkah ini mempertemukan Dirjen PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono dan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dalam satu visi besar: menyelamatkan potensi bahari kawasan pesisir dari ancaman penangkapan ikan ilegal dan kerusakan ekosistem. Selama ini, keterbatasan jangkauan serta fragmentasi pengawasan kerap menjadi celah bagi praktik yang merugikan nelayan lokal. Kemitraan strategis ini hadir untuk merobohkan sekat-sekat operasional tersebut.

Selama lima tahun ke depan, ruang lingkup kerja sama mencakup tiga pilar utama: pengawasan terpadu, penanganan pelanggaran, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Di lapangan, patroli bersama akan memadukan kekuatan armada Ditjen PSDKP dan Pangkalan PSDKP Lampulo dengan dukungan penuh Pemprov Bengkulu. Penegakan hukum pun diperkuat melalui tim penyidik terpadu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk menindak tegas setiap pelanggaran.

Namun, pendekatan yang diambil tidak hanya bersifat represi. Sinergi ini juga menempatkan masyarakat pesisir sebagai aktor utama. Pem-





bentukan serta pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) didorong agar warga lokal aktif menjaga ruang laut mereka sendiri. Di samping itu, program ini mengintegrasikan sektor usaha melalui skema *Corporate Social Responsibility (CSR)* serta pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah lewat BAZNAS untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat nelayan.

Dengan pertukaran data perizinan yang transparan dan sosialisasi regulasi yang masif, kerja sama ini menandai era baru tata kelola kelautan di Bengkulu. Bukan sekadar formalitas di atas kertas, kesepakatan ini adalah janji nyata untuk memastikan laut Bengkulu tetap lestari, berdaya saing, dan menjadi sumber kehidupan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

PSDKP dan PROVINSI GORONTALO

Lalu, Ditjen PSDKP KKP pun mempertegas komitmennya dengan menggandeng Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo melalui kerja sama strategis.

Langkah nyata ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Jakarta oleh Sekretaris Ditjen PSDKP, Saiful Umam, dan Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Dr. Ir. Aryanto Husain, M.MP. Kesepakatan ini menjadi landasan kokoh untuk menghadirkan pengawasan perairan yang terpadu, efektif, dan efisien demi ter-

wujudnya pemanfaatan sumber daya kelautan yang tertib serta taat hukum.

Semangat kolaborasi ini memancarkan komitmen PSDKP untuk tidak bekerja sendirian di lautan. Melalui kerja sama ini, PSDKP mengintegrasikan berbagai aspek krusial pengawasan perairan—mulai dari patroli bersama, penanganan pelanggaran hukum, optimalisasi sarana dan prasarana pengawasan, hingga perkuatan kapasitas sumber daya manusia.

Bukan hanya sinergi antarlembaga pemerintah, PSDKP juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat pesisir. Pembentukan dan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) terus diperkuat agar warga lokal menjadi benteng terdepan dalam menjaga kelestarian laut mereka sendiri. Langkah integratif ini makin padu dengan adanya mekanisme berbagi data dan informasi perizinan hingga pemantauan kapal perikanan secara *real-time*.

Langkah Ditjen PSDKP ini menegaskan bahwa pengawasan laut bukan sekadar penegakan hukum di atas gelombang, melainkan tentang membangun kepercayaan, memberdayakan masyarakat lokal, serta menjaga kedaulatan sumber daya hayati Indonesia. Kolaborasi bersama Provinsi Gorontalo ini menjadi bukti nyata hadirnya negara untuk mewujudkan laut yang sehat, nelayan yang sejahtera, dan masa depan bahari Nusantara yang berkelanjutan.

PSDKP PROVINSI PAPUA BARAT

Bearanjak dari Bengkulu, sebuah langkah strategis diambil di Jakarta pada 27 April 2026 yang menjadi momentum yang monumental. Betapa tidak, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan resmi menggandeng Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Kesepakatan yang ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen PSDKP, Saiful Umam, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat, Dr. Origenes Ijie, ini menjadi tonggak awal penguatan benteng perlindungan laut di wilayah timur Indonesia.

Langkah kolaboratif berdurasi lima tahun ini dirancang khusus untuk menutup celah pengawasan yang selama ini kerap terkendala oleh keterbatasan armada maupun personel di lapangan. Berdasarkan regulasi undang-undang, Pemerintah Provinsi Papua Barat memang memiliki kewenangan pengawasan hingga batas 12 mil laut. Melalui komitmen bersama ini, sinergi kedua belah pihak diupayakan untuk meningkatkan sinkronisasi, efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum demi mewujudkan pemanfaatan sumber daya kelautan yang tertib dan bertanggung jawab.

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup enam ranah utama untuk memperkuat pengawasan perairan. Pertama, kedua pihak menjalankan operasi bersama melalui patroli gabungan di wilayah perairan Papua Barat. Kedua, penanganan pelanggaran dilakukan secara terkoordinasi, mulai dari pengenaan sanksi administratif hingga proses penyidikan. Ketiga, terdapat penguatan kapasitas sumber daya manusia aparaturnya melalui bimbingan teknis, seminar, dan lokakarya. Keempat, pelaksanaan sosialisasi regulasi digencarkan guna menyadarkan para pelaku usaha terkait aturan dan kebijakan yang berlaku. Kelima, sinergi ini memfasilitasi pertukaran data dan informasi mengenai perizinan usaha serta rekam jejak pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Keenam, optimalisasi prasarana dilakukan dengan memanfaatkan secara bersama sarana dan fasilitas pengawasan yang ada demi kelancaran tugas di lapangan.



Penegakan hukum dan efisiensi operasional menjadi pilar mendasar dalam skema kerja sama ini. PSDKP bersama Pemprov Papua Barat sepakat membentuk forum koordinasi penanganan tindak pidana kelautan guna mempercepat proses eksekusi sanksi administratif maupun penyidikan terhadap berbagai pelanggaran. Selain itu, keterbukaan pertukaran data perizinan berusaha dan pencatatan hasil pengawasan dirancang agar seluruh proses penindakan dapat berlangsung secara akuntabel dan terukur. Di sisi lain, pembinaan kapasitas aparaturnya secara berkala melalui bimbingan teknis dan lokakarya juga terus digencarkan untuk memastikan setiap petugas di lapangan memiliki kompetensi yang tangguh.

Namun, menjaga perairan yang begitu luas tentu tidak cukup hanya dengan mengandalkan kehadiran petugas dan armada patroli semata. Oleh sebab itu, strategi ini menempatkan masyarakat lokal sebagai bagian tak terpisahkan dari garis pertahanan laut.

Melalui fasilitasi dan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), nelayan tradisional dibina untuk menjadi mata dan telinga yang aktif melaporkan setiap indikasi praktik ilegal fishing maupun pencemaran lingkungan di wilayah perairan mereka. Dengan koordinasi yang solid antar lembaga serta keterlibatan aktif warga pesisir hingga tahun 2030 mendatang, kolaborasi ini diharapkan mampu menjaga kelestarian laut Papua Barat agar tetap memberikan manfaat berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat setempat.



Penguatan Prasarana Pengawasan Di Wilayah Rawan *IUU Fishing*

Suasana di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, Pulau Setokok, Kepulauan Riau pada senin, 7 Juli 2026 terasa berbeda. Bukan sekadar seremoni, hari itu menjadi penanda dimulainya langkah besar untuk memperkuat infrastruktur pengawasan laut Indonesia.

Sebuah proyek peningkatan dermaga kapal pengawas secara resmi dimulai melalui *ground-breaking* yang dihadiri jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Bakamla, pelaksana pekerjaan, manajemen konstruksi, hingga AKN Kapal Pengawas Ditjen PSDKP.

Di balik pembangunan tersebut, terdapat kebutuhan yang semakin mendesak. Dermaga kapal pengawas Pangkalan PSDKP Batam yang dibangun pada 2010 selama ini menjadi salah

satu simpul penting bagi pergerakan armada pengawasan, khususnya kapal-kapal yang menjalankan operasi di kawasan Laut Natuna Utara. Dengan panjang sekitar 124 meter, dermaga tersebut menopang aktivitas kapal pengawas yang berhadapan langsung dengan dinamika perairan yang sarat kepentingan ekonomi sekaligus memiliki kerawanan terhadap praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (*IUU Fishing*).

Kini, kapasitas itu akan diperbesar. Peningkatan dermaga dirancang untuk memperpanjang kapasitas tambat hingga sekitar 210 meter dengan dukungan 466 titik tiang pancang spun pile berdiameter 500 milimeter. Infrastruktur tersebut juga akan dilengkapi listrik darat, penerangan jalan bertenaga surya, serta pendalaman alur pelayaran. Seluruhnya disiapkan bukan semata untuk mempercantik atau memperluas fasilitas, melainkan untuk menjawab kebutuhan operasional pengawasan yang terus berkembang.



Kebutuhan itu semakin nyata seiring rencana penambahan 10 unit kapal pengawas yang sedang dibangun. Kehadiran armada baru membutuhkan dukungan pangkalan yang memadai agar kapal dapat bersandar, dipersiapkan, dirawat, dan digerakkan secara cepat ketika negara membutuhkan kehadiran di laut.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Menteri Kelautan Laksamana TNI (Purn.) Dr. Didit Herdiawan, M.P.A, M.B.A dan Perikanan bersama Direktur Jenderal PSDKP, Dr Pung Nugroho Saksono secara simbolik menekan tombol sirene. Bunyi sirene menjadi penanda dimulainya pekerjaan konstruksi peningkatan dermaga kapal pengawas Pangkalan PSDKP Batam.

Dalam laporannya, Dirjen PSDKP menegaskan bahwa pembangunan ini diarahkan untuk memperkuat sarana dan prasarana pengawasan kelautan dan perikanan. Infrastruktur yang semakin kuat diharapkan mampu mendukung operasional kapal pengawas secara lebih optimal, sehingga respons terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi merugikan sumber daya kelautan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.

Bagi kawasan Laut Natuna Utara, penguatan tersebut memiliki arti strategis. Perairan ini tidak

hanya menjadi ruang hidup bagi nelayan dan ekosistem laut, tetapi juga kawasan penting bagi aktivitas ekonomi serta kepentingan nasional. Karena itu, keberadaan kapal pengawas dengan dukungan pangkalan yang kuat menjadi bagian penting dari kehadiran negara di laut.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan menekankan bahwa pembangunan infrastruktur pengawasan harus menjadi fondasi bagi penguatan sistem pengawasan kelautan dan perikanan yang modern, terintegrasi, dan adaptif terhadap tantangan di lapangan. Dengan dermaga yang lebih representatif, kapasitas operasional Ditjen PSDKP diharapkan meningkat, sekaligus memperkuat upaya pemberantasan IUU Fishing dan perlindungan sumber daya kelautan dalam kerangka implementasi Ekonomi Biru.

Namun, pembangunan fisik bukan satu-satunya perhatian. Wakil Menteri juga meminta agar pelaksanaan proyek didampingi pihak kejaksaan. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh tahapan pembangunan berlangsung transparan dan akuntabel, sejak proses awal hingga pekerjaan dinyatakan selesai.

Setelah seremoni groundbreaking, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan bersama

para tamu undangan meninjau langsung lokasi pembangunan. Di lapangan, penyedia pekerjaan dan Konsultan Manajemen Konstruksi memaparkan ruang lingkup pekerjaan, tahapan dan jadwal pelaksanaan, target penyelesaian, serta mekanisme pengendalian mutu dan keselamatan konstruksi atau K3.

Dari titik inilah pembangunan dermaga tidak berhenti sebagai proyek infrastruktur. Ia menjadi bagian dari rantai panjang pengawasan laut mulai dari dermaga, kapal, awak, sistem pemantauan, hingga penindakan terhadap pelanggaran. Semuanya saling terhubung dalam satu tujuan: memastikan sumber daya kelautan Indonesia terlindungi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Dengan dimulainya pekerjaan konstruksi, seluruh pihak yang terlibat—kontraktor, konsultan manajemen konstruksi, pejabat pembuat komitmen,



hingga aparat penegak hukum memikul komitmen yang sama. Pembangunan harus diselesaikan sesuai spesifikasi teknis, jadwal yang telah disepakati, serta standar mutu dan keselamatan konstruksi yang berlaku.





PERAN KRUSIAL CALL CENTER PSDKP

Di Balik Telepon Tengah Malam, Ada Harapan yang Dijaga Call Center PSDKP

Telepon berdering ketika sebagian besar orang sedang terlelap. Jam menunjukkan sekitar pukul 03.00 dini hari. Di ujung sambungan, terdengar suara seorang perempuan yang menyimpan kecemasan. Ia adalah istri seorang nelayan. Suaminya tidak dapat dihubungi. Enam bulan berlalu tanpa kabar.

"Suami saya tidak bisa dihubungi." Bagi orang lain, panggilan itu mungkin hanya sebuah percakapan singkat. Namun bagi Al-Anshory Wicaksono, petugas *Call Center* Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), telepon tersebut adalah sebuah amanah.

Di balik setiap panggilan yang masuk, ada manusia dengan persoalannya masing-masing. Ada nelayan yang membutuhkan pertolongan, keluarga yang menunggu kabar dari tengah laut, hingga laporan kecelakaan yang membutuhkan respons cepat.

"Senang rasanya bisa membantu banyak orang," ujar pria berusia 37 tahun ini.

Ketika Telepon Menjadi Penghubung Harapan

Bekerja di *Call Center* PSDKP membuat Al-Anshory terbiasa mendengar berbagai cerita dari laut. Tidak semuanya datang pada jam kerja. Sebagian justru muncul ketika malam telah larut, ketika jarak antara keluarga dan orang yang mereka cintai terasa semakin jauh.

Dalam kasus istri nelayan yang menelepon dini hari itu, Al-Anshory dan tim berupaya menelusuri informasi yang tersedia. Tujuannya sederhana: menemukan kabar yang selama enam bulan dinanti.

Bagi keluarga nelayan, informasi tentang keberadaan anggota keluarga bukan sekadar data. Satu koordinat dapat berarti ketenangan. Satu panggilan telepon dapat menghapus kecemasan yang selama berbulan-bulan dipendam.

Di situlah *Call Center* PSDKP memainkan perannya—menjadi penghubung antara masyarakat dengan sistem pengawasan dan sumber daya yang dimiliki negara.

Namun, tidak semua panggilan berakhir dengan kabar yang diharapkan.

Ada Panggilan yang Membawa Duka

Suatu ketika, laporan darurat masuk dari seorang nelayan. Seorang anak buah kapal (ABK) tercebur ke laut.

Informasi tersebut segera ditindaklanjuti. Upaya pencarian dilakukan dengan menghubungi kapal-kapal perikanan yang berada di sekitar lokasi, berharap ada kapal terdekat yang dapat memberikan pertolongan.

Harapan sempat muncul ketika ABK tersebut akhirnya ditemukan. Namun, kabar yang diterima justru membawa kesedihan. ABK itu ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa.

“Sedihnya ketika mendapat informasi bahwa ABK sudah ditemukan, tetapi sudah tak bernyawa,” tutur pria yang sudah bekerja selama 14 tahun di Kementerian Kelautan dan Perikanan ini.

Bagi petugas yang menerima dan meneruskan laporan, kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa di balik setiap koordinat dan laporan kejadian di laut, terdapat kehidupan manusia.

Mencari Kapal yang Bahkan Namanya Tak Diketahui

Ada pula cerita lain yang membuat Al-Anshory merasa pekerjaannya memiliki arti.

Seorang ibu menghubungi *Call Center* PSDKP karena ingin berbicara dengan anaknya yang bekerja sebagai ABK kapal perikanan. Masalahnya, sang ibu tidak mengetahui nama kapal tempat anaknya bekerja.

Nama kapal tidak diketahui.

Perusahaan tempat anaknya bekerja pun tidak diketahui. Dalam kondisi seperti itu, pencarian informasi menjadi seperti menyusun kepingan puzzle. Al-Anshory dan tim menggali informasi yang diberikan sang ibu dan mencoba mencocokkannya dengan data yang tersedia.

Mereka tidak menyerah.

Hingga akhirnya, titik terang ditemukan. Informasi mengenai keberadaan sang anak berhasil ditelusuri dan komunikasi antara ibu dan anak tersebut dapat difasilitasi.

Sebuah percakapan sederhana pun akhirnya



terjadi. Bagi sang ibu, mungkin hanya beberapa menit berbicara dengan anaknya. Namun bagi petugas *Call Center* PSDKP, momen tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pekerjaan ini layak diperjuangkan.

Di Balik Sistem, Ada Orang-Orang yang Mendengarkan

Menurut pria kelahiran Jakarta ini, sudah banyak kapal nelayan telah menghubungi *Call Center* PSDKP. Hal tersebut menunjukkan semakin pentingnya layanan komunikasi antara masyarakat perikanan dengan pemerintah.

Call Center tidak hanya menjadi tempat menerima laporan. Layanan tersebut menjadi pintu awal bagi berbagai informasi dari lapangan untuk diteruskan kepada pihak yang dapat memberikan respons.

Dan di balik layanan tersebut, Al-Anshory tidak bekerja sendirian. Ada M. Ardi, Ketua Tim Kerja Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, bersama rekan-rekannya Zuleha Ernas, Fery Gunawan, Laras Kinanti Pinandita, Oktaviani Ayuningrum, dan Zalfa Alifiana.

Mereka bekerja di balik layar, menerima informasi, memverifikasi, menelusuri data, berkoordinasi, dan memastikan laporan masyarakat mendapatkan tindak lanjut.

Bagi masyarakat yang menelepon, mungkin yang terdengar hanya suara seorang petugas di seberang sambungan.

Tetapi di balik suara itu ada sebuah sistem. Dan di balik sistem itu ada manusia. Karena Laut Tidak Pernah Sekadar Soal Koordinat

Pengawasan kapal perikanan sering kali identik dengan teknologi, sistem pemantauan, layar monitor, data pergerakan kapal, dan titik koordinat.

Namun pengalaman para petugas *Call Center* PSDKP menunjukkan bahwa di balik semua itu ada cerita yang jauh lebih manusiawi.

Ada suami yang tidak kunjung memberi kabar. Ada ibu yang ingin mendengar suara anaknya. Ada nelayan yang membutuhkan pertolongan. Ada keluarga yang menunggu kepastian. Dan terkadang, ada kabar duka yang harus disampaikan.

Setiap telepon membawa cerita yang berbeda. Sebagian berakhir dengan kelegaan, sebagian lainnya meninggalkan kesedihan. Tetapi satu hal tetap sama: setiap panggilan adalah kesempatan untuk membantu.

Karena itu, bagi Tim Kerja Sistem Pemantauan Kapal Perikanan Ditjen PSDKP, menjawab telepon bukan sekadar menjalankan tugas.

Mereka mendengarkan. Mereka menelusuri. Mereka merespons.

Dan ketika memungkinkan, mereka membantu memastikan seseorang di tengah laut dapat kembali terhubung dengan orang-orang yang menunggunya di daratan.

Sebab di balik satu panggilan telepon, terkadang ada satu keluarga yang sedang menunggu harapan.

WUJUD KEHADIRAN NEGARA UNTUK KESELAMATAN NELAYAN

Sejak diluncurkan, *Call Center* Ditjen PSDKP di nomor 0811-1000-3132 telah memberikan dampak positif bagi nelayan, khususnya bagi kapal-kapal yang mengalami kondisi darurat maupun membutuhkan bantuan saat berada di laut. Kehadiran layanan ini menjadi salah satu upaya Ditjen PSDKP untuk memperkuat respons terhadap berbagai situasi yang dihadapi nelayan di tengah laut.

Bagi nelayan yang berada jauh dari daratan, akses terhadap bantuan menjadi hal yang sangat penting. Dalam kondisi darurat, kecepatan

informasi dan respons dapat menentukan keselamatan awak kapal. Karena itu, keberadaan *Call Center* PSDKP diharapkan menjadi saluran komunikasi yang mudah diakses, sehingga informasi mengenai kondisi kapal yang membutuhkan pertolongan dapat segera diterima dan dikoordinasikan dengan petugas di lapangan.

Direktur Jenderal PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M., menegaskan bahwa layanan tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan negara di tengah aktivitas nelayan di laut.

"*Call Center* PSDKP kami hadir bukan sekadar sebagai saluran komunikasi, tetapi sebagai pintu pertama bagi nelayan ketika menghadapi persoalan di laut. Ketika ada nelayan yang membutuhkan pertolongan, kami ingin informasi tersebut dapat diterima dan segera ditindaklanjuti." ujar Ipunk.

Lebih lanjut, Ipunk mengatakan VMS bukan hanya untuk mengawasi kapal, tetapi juga untuk menemukan mereka yang membutuhkan pertolongan. "Bagi kami, setiap kapal yang berhasil ditolong bukan sekadar angka dalam laporan. Di dalamnya ada nelayan, ada keluarga yang menunggu di darat, dan ada harapan agar mereka dapat kembali dengan selamat. Karena itu, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan harus selalu berorientasi pada perlindungan, keselamatan, dan kebermanfaatan bagi masyarakat."

Ipunk juga mengajak para nelayan untuk tidak ragu memanfaatkan layanan *Call Center* PSDKP apabila menghadapi kondisi darurat di laut. Informasi yang disampaikan sedini mungkin akan membantu petugas melakukan koordinasi dan menentukan langkah penanganan sesuai kondisi di lapangan.

"Kami ingin nelayan tahu bahwa ketika mereka berada di laut, mereka tidak sendirian. Ada sistem, ada petugas, ada Kapal Pengawas, dan ada negara yang siap memberikan bantuan sesuai kewenangannya. Karena menjaga laut bukan hanya tentang mengawasi aktivitas di dalamnya, tetapi juga memastikan setiap orang yang mencari nafkah di laut dapat menjalankan aktivitasnya dengan rasa aman dan kembali kepada keluarganya," pungkash Ipunk.



INDONESIA
BERDAULAT
ADIL DAN
MAKMUR

Seluruh UPT PSDKP
Sambut **Bulan Merdeka**
dengan Ragam Kegiatan



Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, nuansa nasionalisme tidak hanya membumbung lewat kibaran Sang Saka Merah Putih di sepanjang pesisir.

Di seluruh Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, semangat memperingati bulan kebebasan ditandai dengan aksi nyata yang menyentuh akar rumput. Sejak memasuki bulan Juli, seluruh unit kerja PSDKP menyambut Hari Merdeka dengan menggelar serangkaian kegiatan kemanusiaan serta penggalangan dana secara serentak.

Kemerdekaan sejati bukan sekadar lepas dari belenggu sejarah, melainkan tentang bagaimana menghadirkan kepedulian dan manfaat nyata bagi sesama. Menyadari hal tersebut, para penjaga samudra yang sehari-hari berhadapan dengan gelombang dan tugas pengawasan yang ketat, kini melunakkan ketegasan mereka untuk mengulurkan tangan. Berbagai Pangkalan PSDKP secara masif merancang aksi sosial yang menyasar masyarakat pesisir, nelayan kecil,

hingga warga yang membutuhkan bantuan di sekitar wilayah operasional.

Aksi yang dimulai sejak awal Juli ini melibatkan seluruh elemen, mulai dari pejabat struktural, perwira di atas Kapal Pengawas, hingga jajaran staf di darat. Secara serentak, gerakan penggalangan dana kemanusiaan dibuka di seluruh pangkalan. Donasi yang terkumpul dari kesukarelaan para pegawai ini dialokasikan untuk menyokong berbagai kegiatan sosial, seperti pembagian paket sembako, bantuan pendidikan bagi anak-anak nelayan, bantuan kesehatan gratis, hingga aksi donor darah yang melibatkan jajaran instansi maritim setempat.



Langkah kolektif ini membuktikan bahwa dedikasi Ditjen PSDKP tidak berhenti pada fungsi penegakan hukum dan perlindungan ekosistem laut belaka. Kepedulian sosial merupakan pondasi penting dalam membangun sinergi dengan masyarakat. Nelayan dan komunitas pesisir bukan sekadar objek pengawasan, melainkan mitra strategis dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia. Melalui balutan kegiatan kemanusiaan ini, ikatan emosional antara PSDKP dan masyarakat bahari semakin diperkuat.

Semangat menyambut Hari Merdeka dengan aksi peduli sesama ini menghadirkan napas baru dalam memaknai nasionalisme. Kehadiran negara tidak hanya dirasakan saat Kapal Pengawas menghalau ancaman illegal fishing di laut lepas, tetapi juga hadir secara nyata di tengah kesulitan warga pesisir melalui uluran tangan yang hangat. Kepedulian serentak ini membuktikan bahwa ketegasan di tengah laut senantiasa beriringan dengan kelembutan empati di darat.

Moment kemerdekaan ini seyogyanya menjadi momentum yang monumental, seluruh Pangkalan PSDKP berhasil menunjukkan bahwa merdeka adalah tentang saling menopang dan berbagi. Gelombang kebaikan yang bergerak serentak dari ujung barat hingga timur Indonesia



ini tidak hanya mempererat solidaritas internal, tetapi juga membakar jiwa patriotisme di hati masyarakat bahari. Menjaga laut adalah tugas utama, namun merawat kemanusiaan adalah panggilan jiwa para penjaga samudra.





PEMERINTAH DESA KARANGJALADRI



GARDA PESISIR KARANGJALADRI : Menjaga Laut, Menopang Ekonomi Biru

Desa Karangjaladri di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, kini resmi menjadi salah satu benteng utama pengelolaan sumber daya laut berbasis masyarakat.

Pada Kamis, 13 Agustus 2026, Pangkalan PSDKP Jakarta menggelar agenda strategis bertajuk Penguatan Peran Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) guna mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yaitu Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Kegiatan yang berlangsung di Balai Nelayan KNMP Karangjaladri ini dihadiri oleh perwakilan Pokmaswas Pagar Laut, Dinas Kelautan,

Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran, UPTD PSDKP Wilayah Selatan Jawa Barat, pengawas perikanan, serta para penyuluh perikanan. Kolaborasi lintas sektor ini bertujuan utama untuk membangun sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengawal kawasan pesisir secara partisipatif dan berkelanjutan.

Program KNMP itu sendiri dirancang untuk mentransformasi desa nelayan menjadi kawasan yang modern, produktif, mandiri, dan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Namun, keberhasilan program nasional ini tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik infrastruktur semata,

melainkan juga pada keberlanjutan ekosistem laut dan kepatuhan hukum di lapangan. Di sinilah Pokmaswas Pagar Laut mengambil peran krusial sebagai mitra strategis sekaligus “mata dan telinga” pemerintah. Dalam forum pembinaan tersebut, Ketua Tim Kerja Prasarana, Sarana, dan Operasi Kapal Pengawas Pangkalan PSDKP Jakarta menekankan bahwa kedekatan Pokmaswas dengan aktivitas harian nelayan menjadi modal sosial yang sangat berharga untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran, seperti destructive fishing maupun pencemaran lingkungan.

Untuk mengoptimalkan peran lapangan tersebut, diperkenalkan model kerja praktis berupa pendekatan 3M + 5 Fungsi. Tiga langkah utama yang wajib dijalankan Pokmaswas mencakup Melihat/Mendengar aktivitas pemanfaatan sumber daya dan kondisi lingkungan, Mencatat serta mendokumentasikan informasi dugaan pelanggaran secara rinci, hingga Melaporkan temuan tersebut secara cepat kepada aparat PSDKP atau instansi berwenang. Ketiga langkah ini diperkuat oleh fungsi pengawasan lapangan, penyadaran hukum masyarakat, deteksi dini, pelaporan berjenjang, dan pemberdayaan kawasan. Kendati demikian, ditegaskan pula bahwa Pokmaswas tidak mengambil alih kewenangan penegakan hukum, melainkan memperkuat basis data dan informasi awal yang akurat untuk ditindaklanjuti oleh petugas resmi.

Sinergi ini memiliki relevansi yang sangat tinggi mengingat Karangjaladri merupakan bagian dari 65 lokasi KNMP Tahap I di Indonesia yang telah menyelesaikan 100 persen konstruksinya hingga Agustus 2026. Keberhasilan penataan kawasan di Pangandaran ini diproyeksikan menjadi percontohan bagi target pengembangan 1.100 lokasi KNMP secara nasional hingga tahun 2029 mendatang. Melalui matrik sinergi yang disepakati, keberadaan Pokmaswas tidak hanya menjaga keamanan dan kelestarian ekosistem pesisir, tetapi juga menjamin kelancaran operasional fasilitas penangkapan serta meningkatkan mutu dan ketertelusuran produk hasil perikanan nelayan lokal.

Pertemuan di Balai Nelayan Karangjaladri ini



akhirnya melahirkan komitmen bersama yang konkret. Sekretariat KNMP Karangjaladri dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sepakat untuk merangkul Pokmaswas Pagar Laut secara berkala dalam forum koordinasi dan pengawasan wilayah. Pokmaswas juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kesadaran hukum warga pesisir serta menyampaikan laporan lapangan secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan terjalinnya kolaborasi yang solid ini, Desa Karangjaladri tidak hanya siap tumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru nelayan, tetapi juga bertransformasi menjadi benteng utama kelestarian dan kedaulatan laut di pesisir selatan Jawa Barat.





Perkuat Pengawasan Pesisir, PSDKP Tarakan Bina Pokmaswas Bunyu Selatan

Pesisir Bunyu Selatan bukan sekadar ruang hidup bagi masyarakat nelayan. Di kawasan ini, laut menjadi sumber penghidupan, tempat menggantungkan harapan, sekaligus ruang yang harus dijaga keberlanjutannya. Karena itu, ketika aktivitas di laut terus berkembang dan pemanfaatan sumber daya kelautan semakin dinamis, pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan kehadiran aparat pemerintah. Sebaliknya, masyarakat yang setiap hari beraktivitas di laut memiliki posisi penting sebagai mata dan telinga yang paling dekat dengan wilayahnya sendiri.

Semangat tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang digelar Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tarakan di Desa Bunyu Selatan, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Melalui kegiatan ini, pengawasan berbasis masyarakat diperkuat agar tidak hanya menjadi konsep, tetapi benar-benar tumbuh dari kehidupan masyarakat pesisir.

Selain itu, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung keberlanjutan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Sebab, pembangunan kampung nelayan tidak hanya berbicara mengenai peningkatan kesejahteraan,

tetapi juga menyangkut bagaimana masyarakat mampu menjaga ruang hidupnya agar tetap produktif dari waktu ke waktu.

Bagi nelayan, berbagai persoalan di laut sering kali diketahui lebih cepat oleh mereka yang setiap hari berada di perairan. Ketika kapal bergerak, aktivitas penangkapan berlangsung, atau terjadi perubahan pada kondisi lingkungan, masyarakat nelayan dapat menjadi pihak pertama yang melihat dan merasakannya. Karena itulah, pengetahuan lokal yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari menjadi modal penting untuk melengkapi keterbatasan jangkauan pengawasan pemerintah.

Melalui pembinaan tersebut, kapasitas anggota POKMASWAS terus diperkuat, terutama dalam memahami ketentuan hukum di bidang kelautan dan perikanan. Dengan pemahaman yang semakin baik, mereka diharapkan mampu mengenali berbagai bentuk pelanggaran, termasuk praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) maupun penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing). Jika dibiarkan, praktik semacam itu bukan hanya merugikan nelayan lain, melainkan juga dapat merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan.

Namun, pengawasan partisipatif pada dasarnya bukan hanya tentang menemukan dan melaporkan pelanggaran. Lebih jauh dari itu, pengawasan merupakan proses membangun kesadaran bersama bahwa laut adalah aset yang dimiliki dan dimanfaatkan bersama. Oleh karena itu, keberlangsungannya pun menjadi tanggung jawab bersama.

Atas dasar itulah, forum pembinaan juga menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai unsur yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan wilayah pesisir. POKMASWAS berkoordinasi dengan pengurus KNMP, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, penyuluh perikanan, serta Stasiun PSDKP Tarakan. Dengan adanya

pertemuan lintas sektor tersebut, informasi mengenai dugaan pelanggaran dapat diteruskan melalui mekanisme pelaporan yang lebih jelas, cepat, dan terstruktur.

Dengan demikian, sinergi yang dibangun tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi. Sebaliknya, terbentuk jejaring pengawasan yang memungkinkan masyarakat mengetahui kepada siapa laporan harus disampaikan, sementara aparat memperoleh saluran informasi yang lebih dekat dengan kondisi nyata di lapangan.

Di Bunyu Selatan, penguatan POKMASWAS sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun fondasi KNMP yang kuat. Sebab, kampung nelayan



yang ingin tumbuh dan berkembang tidak cukup hanya memiliki aktivitas ekonomi yang bergerak. Kampung nelayan juga membutuhkan tata kelola sumber daya yang bertanggung jawab, lingkungan pesisir yang terjaga, serta masyarakat yang memiliki kesadaran untuk melindungi laut.

Pada akhirnya, pengawasan itu memang bermula dari pesisir.

Menjaga laut juga berarti merawat harapan agar generasi nelayan berikutnya tetap memiliki perairan yang sehat, sumber daya ikan yang melimpah, serta ruang hidup yang layak untuk meneruskan kehidupan dari laut.



Dedikasi UPT PSDKP Cilacap Menjaga Kedaulatan Laut Nusantara

Berdiri kokoh menantang gelombang di Jl. Mutiara No. 1, Lomanis, Cilacap Tengah, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Cilacap merupakan benteng pertahanan utama bagi kedaulatan bahari Indonesia. Sejak difungsikan pada 10 Februari 2017 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2016, Unit Pelaksana Teknis (UPT) ini memegang mandat vital sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan demi membumikan visi besar Ekonomi Biru.

Jangkauan pengawasannya tak main-main. Unit Pelaksana Teknis yang dikomandoi oleh Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi., M.Pi ini membawahi empat Satuan Pengawasan (Satwas) meliputi Satwas Pati, Pekalongan, Trenggalek, hingga Malang—yang membentang luas menembus batas tiga provinsi: Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Mengawal wilayah kerja seluas Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573 dan 712 bukanlah tugas ringan. Di

tengah keterbatasan sarana prasarana serta ancaman dinamika cuaca ekstrem, semangat 126 personel PSDKP Cilacap tak pernah surut.

Berbekal ketangguhan armada kapal pengawas seperti KP Hiu Macan 04 dan KP Hiu 04, yang didukung pergerakan lincah armada speedboat serta RIB Sea Rider, para “Pengawas Samudera” ini rutin menyisir perairan lepas. Fokus mereka tegas: memutus mata rantai praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* serta aksi destructive fishing yang merusak ekosistem bahari.

Peran PSDKP Cilacap tak berhenti pada patroli perairan. Kehadirannya dirasakan nyata dalam penataan ruang laut dan penegakan aturan. Langkah tegas ditunjukkan lewat penghentian sementara berbagai kegiatan usaha yang membandel terhadap ketentuan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) mulai dari industri galangan kapal di Tegal hingga kawasan tambak di Malang.

“PSDKP hadir bukan hanya untuk mengawasi laut, tetapi juga memastikan setiap jengkal ruang laut dimanfaatkan sesuai aturan. Jika ketentuan

PKKPRL tidak dipenuhi, kami tidak akan ragu mengambil tindakan tegas. Penegakan aturan ini adalah bagian dari upaya menjaga ruang laut agar tertib, berkelanjutan, dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.” Ujar Dwi Santoso Wibowo.

Di saat yang sama, kepedulian terhadap keanekaragaman hayati terus ditunjukkan. Ketangkasan dan respon cepat personel di lapangan dibuktikan lewat penyelamatan aset negara, salah satunya aksi pelepasliaran 5.859 ekor Benih Bening Lobster (BBL) ilegal di perairan Cilacap agar kembali berkembang di habitat alaminya.

Terbaru, Stasiun PSDKP Cilacap dengan cekatan melakukan pengawasan terhadap Informasi penjualan Pulau Menjangan Kecil di Karimunjawa yang viral di media sosial. Hasilnya, meskipun berita penjualan tersebut merupakan hoax, akan tetapi Pengawas Kelautan Stasiun PSDKP Cilacap menemukan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yaitu adanya aktivitas Menjangan Resort yang meliputi pemanfaatan pulau, jetty, dan pemeliharaan satwa laut yang diduga belum dilengkapi perizinan sesuai ketentuan. Tim Stasiun PSDKP Cilacap memasang Papan Penghentian Sementara Kegiatan dan akan melakukan pemeriksaan serta klarifikasi terhadap pengelola.

Era Baru Pelayanan Digital

Menjawab tantangan zaman, PSDKP Cilacap mengusung transformasi digital sebagai resep utama menghadirkan pelayanan publik yang transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui terobosan inovasi **SI TEMAN SLO**, durasi penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) berhasil dipangkas secara drastis dari yang semula memakan waktu 90 menit menjadi hanya 30 menit secara real-time.

Efisiensi ini kian lengkap dengan lahirnya inovasi **CEKATAN** (*Cek Kapal Tanpa Antrian*) serta pembentukan **Satgas BATIK**. Sinergi pengawasan yang terintegrasi ini terbukti ampuh mendongkrak tingkat kepatuhan para pelaku usaha perikanan secara signifikan.

Buah Manis Pengawasan Efektif

Kehadiran sistem pengawasan yang efektif dan kemudahan layanan melalui gerai perizinan

membawa dampak ekonomi yang sangat nyata. PSDKP Cilacap berhasil mendorong migrasi ribuan kapal perikanan untuk beralih menggunakan izin pusat.

Dampaknya langsung terasa pada kas negara. Pada tahun 2025, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pascaproduksi mencatatkan lonjakan fantastis hingga mencapai **Rp197,50 miliar**, sebuah capaian monumental yang mengembalikan hasil laut untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, Melalui deklarasi ini, seluruh pihak sepakat untuk menghentikan kebiasaan membuang sampah terutama plastik ke perairan. Kegiatan ini dirancang untuk menumbuhkan kesadaran kolektif serta membangun budaya baru yang peduli lingkungan di lingkungan pelabuhan dan armada penangkapan ikan.

PSDKP Cilacap juga menggelar Deklarasi Kapal Perikanan Bebas Sampah bersama para pelaku usaha dan awak kapal perikanan setempat. Langkah ini menjadi wujud komitmen nyata seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian laut serta mendorong praktik perikanan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, dengan tanpa kompromi, PSDKP Cilacap hentikan sementara Unit Pengolahan Ikan (UPI) milik PT ISF di Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, sementara Senin (16/03).

Keputusan tegas ini bukan tanpa alasan. Gerak cepat petugas menjadi jawaban atas keresahan warga sekitar yang geram dengan dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pabrik. Bau menyengat dan limbah yang disalurkan merusak ekosistem pesisir tak lagi bisa ditoleransi. Langkah penyegelan ini menjadi bukti nyata hadirnya negara dalam merespons jeritan masyarakat demi menjaga kelestarian lingkungan.

Kini, UPT PSDKP Cilacap semakin memantapkan langkahnya. Dengan menggelorakan semangat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta menanamkan *core values* BerAKHLAK pada setiap insan pengawas, UPT Cilacap membuktikan sebuah cita-cita mulia: bahwa pengawasan yang kuat dan pelayanan yang hebat adalah kunci utama menjaga laut Indonesia tetap lestari, berdaulat, dan menyejahterakan masyarakat pesisir. (nat/ang)



Fokus pada Tujuan, Bukan pada Hambatan

Oleh : Dirjen PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono

Selamat pagi, seluruh insan PSDKP yang saya banggakan!

Setiap kali fajar menyingsing di atas lautan Nusantara, saya selalu teringat akan alasan utama mengapa kita berdiri di sini. Di tengah gelombang samudera yang tidak pernah tenang, di atas kapal-kapal pengawas yang menerjang badai, ada tanggung jawab besar yang diamanahkan rakyat di pundak kita: menjaga kehutanan, kedaulatan, dan keberlanjutan laut Indonesia.

Hari ini, mari kita jaga semangat pengabdian yang membara dan optimisme yang tak tergoyahkan. Masa depan kelautan Indonesia terbentang luas, begitu penuh dengan peluang dan harapan. Namun, saya menyadari betul bahwa perjalanan menjaga kedaulatan laut ini tidak pernah lepas dari tantangan. Gelombang besar, cuaca buruk, keterbatasan armada, hingga dinamika ancaman *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* sering kali berdiri bak dinding tinggi di hadapan kita.

Namun ingatlah satu prinsip penting yang harus selalu terpatut dalam dada setiap prajurit PSDKP: Kunci sukses adalah fokus pada tujuan, bukan pada hambatan.

Ketika kapal kita dihadap badai, seorang nahkoda sejati tidak akan memfokuskan pandangannya pada amukan ombak, melainkan pada garis pantai dan arah kompas yang dituju. Begitu pula dengan perjuangan kita. Hambatan, sekecil apa pun ia menerjang, hanyalah dinamika perjalanan. Tujuan akhir kitalahmyakni kedaulatan laut Indonesia dan kesejahteraan para nelayan—yang menjadi bintang penuntun utama.

Prinsip dasar ini telah dibuktikan oleh para tokoh terkemuka dunia. Pakar kepemimpinan dan penulis legendaris John C. Maxwell pernah menegaskan:

“Seorang pemimpin yang sukses tahu cara menjaga fokusnya pada tujuan, bukan pada masalah. Ketika Anda berfokus pada masalah, masalah itu akan membesar; tetapi ketika Anda berfokus pada tujuan, jalan menuju kesuksesan akan terbuka.”

Prinsip ini senada dengan penegasan dari motivato dan pakar pengembangan diri kenamaan, Tony Robbins, yang menyatakan:

“Dimana fokus Anda mengalir, di situlah energi Anda akan tercipta. Jika Anda memfokuskan pikiran pada rintangan, Anda hanya akan menemukan alasan untuk berhenti. Namun jika Anda memfokuskan pikiran pada hasil akhir, Anda akan selalu menemukan jalan keluar.”

Bahkan dalam dunia profesional dan organisasi modern, pakar manajemen global Peter Drucker turut menggarisbawahi pentingnya hal ini. Beliau menekankan:

“Hasil yang luar biasa tidak pernah diraih dengan mengkhawatirkan rintangan atau memecahkan masalah semata, melainkan dengan mengeksplorasi dan

memanfaatkan peluang demi mencapai tujuan utama.”

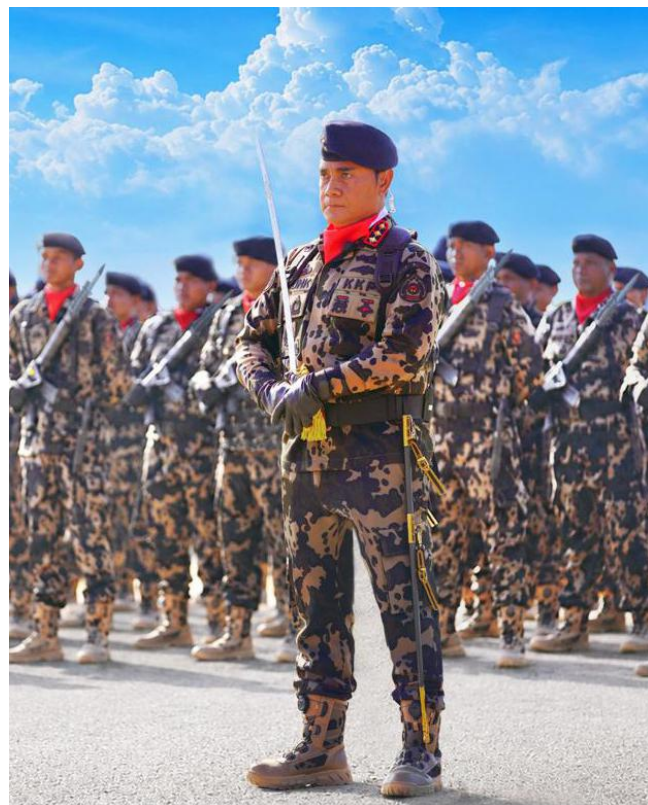
Para insan PSDKP yang Tangguh,

Tiga pandangan pakar tersebut menguatkan apa yang senantiasa kita yakini. Jika mata kita hanya tertuju pada besarnya tantangan, kita akan mudah lelah dan ragu. Tetapi jika mata, hati, dan pikiran kita terkunci rapat pada visi besar PSDKP, maka setiap rintangan justru akan menjadi pendorong semangat untuk terus bertransformasi, berinovasi, dan bergerak lebih cepat.

Mari kita tatap masa depan dengan dada tegap dan optimisme membumbung tinggi. Setiap peluh yang menetes di dek kapal, setiap jam tugas di pos pengawasan, dan setiap keputusan tegas di lapangan adalah bagian dari sejarah besar penegakan kedaulatan laut bangsa ini.

Tetap jaga kekompakan, pertajam fokus, dan kobarkan semangat pengabdian. Kita adalah garda terdepan penjaga samudra!

Selamat bertugas, tetap semangat, dan Salam PSDKP!



SOSOK



SUMONO DARWINTO:

Memimpin Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dengan Ketegasan, Pengalaman, dan Keteladanan

“Laut mengajarkan satu hal: semakin luas yang dijaga, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Sebab menjaga laut bukan sekadar mempertahankan batas wilayah, melainkan merawat kehidupan, menegakkan aturan, dan memastikan kekayaan bangsa tetap menjadi warisan bagi generasi yang akan datang.”

- SUMONO DARWINTO -

Filosofi itulah yang seolah menemukan pantulannya dalam sosok Sumono Darwinto—seorang aparatur yang menapaki perjalanan panjang dari dunia lapangan hingga dipercaya memegang amanah sebagai Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Bagi Sumono, laut bukan sekadar bentang biru yang membelah pulau-pulau Indonesia. Laut adalah ruang kehidupan, sumber penghidupan, sekaligus aset bangsa yang harus dijaga. Selama hampir tiga dekade mengabdikan jejak kariernya ditempa dari berbagai wilayah pengawasan. Pengalaman panjang tersebut membentuk cara pandangnya dalam memimpin: pengawasan tidak cukup dilakukan dari balik meja, tetapi harus hadir dan memahami kondisi nyata di lapangan.

Pria kelahiran Jakarta, 14 Juli 1974, ini menduduki jabatan Direktur Pengawasan Sumber Daya



Kelautan sejak 4 November 2024. Dengan pangkat Pembina Utama Muda IV/c dan masa kerja lebih dari 28 tahun, Sumono membawa pengalaman panjang dalam dunia pengawasan kelautan dan perikanan.

Namun, sebelum sampai pada posisi tersebut, Sumono terlebih dahulu ditempa melalui berbagai penugasan di unit pelaksana teknis (UPT) PSDKP. Pengalaman itu menjadi bagian penting dalam membentuk gaya kepemimpinannya saat ini. Ia pernah berada di posisi yang mengharuskannya berhadapan langsung dengan dinamika pengawasan di daerah, memimpin personel, mengambil keputusan dalam keterbatasan, sekaligus bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan tugas.

Salah satu fase penting dalam perjalanan tersebut adalah ketika ia dipercaya menjadi Kepala Stasiun PSDKP Pontianak pada 2013. Meskipun masa penugasannya relatif singkat, pengalaman tersebut menjadi bagian dari prosesnya memahami karakter pengawasan di tingkat UPT.



Perjalanan berikutnya membawanya ke kawasan timur Indonesia. Pada 21 Juli 2016, Sumono dipercaya sebagai Kepala Pangkalan PSDKP Bitung. Selama lebih dari tiga tahun, ia memimpin pangkalan yang berada di kawasan dengan dinamika aktivitas kelautan dan perikanan yang tinggi.

Dari Bitung, ia kemudian dipercaya memimpin Pangkalan PSDKP Jakarta sejak Desember 2019. Selama lebih dari tiga tahun, ia kembali berhadapan dengan karakter pengawasan yang berbeda, dengan kompleksitas aktivitas kelautan, kepentingan usaha, serta koordinasi yang lebih luas.

Pengalaman sebagai Kepala UPT di beberapa wilayah tersebut membuat Sumono tidak asing dengan persoalan yang dihadapi jajaran pengawasan di lapangan. Ia pernah berada di posisi yang sama dengan para petugas yang kini ia pimpin—menghadapi keterbatasan sumber daya, kebutuhan koordinasi, tuntutan kecepatan dalam mengambil keputusan, serta berbagai situasi yang tidak selalu dapat diprediksi.

Karena itu, ketika kini berada pada posisi sebagai Direktur, ia memahami bahwa sebuah instruksi dari pusat memiliki konsekuensi nyata bagi petugas di lapangan. Pemahaman tersebut menjadi modal penting dalam menyusun arahan dan mengambil kebijakan pengawasan.

Dalam posisinya sebagai Direktur, Sumono memimpin pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan, sebuah tugas yang mencakup wilayah dan aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan yang sangat luas. Tanggung jawab tersebut bukan hanya memastikan kegiatan pengawasan berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga mengarahkan strategi pengawasan, memastikan kesiapan dan kinerja jajaran, memperkuat koordinasi, serta mengambil keputusan ketika menghadapi persoalan di lapangan.

Pengalaman panjang sebagai Kepala UPT membuatnya memiliki satu prinsip: pemimpin harus memahami kondisi lapangan sebelum mengambil keputusan.

Itulah sebabnya, turun langsung dalam kegiatan pengawasan menjadi bagian dari karakter kepemimpinan Sumono. Ia tidak hanya memberikan arahan, tetapi berupaya hadir bersama jajaran untuk melihat secara langsung kondisi lapangan, memahami persoalan yang dihadapi petugas, dan memastikan pelaksanaan pengawasan berjalan sesuai tujuan.

Baginya, pemimpin tidak cukup hanya pandai memerintah.

“Kalau hanya bisa memerintah, itu belum cukup menjadi seorang pemimpin. Pemimpin harus tahu apa yang dikerjakan oleh timnya dan memahami kondisi di lapangan.” ujar pria kelahiran Jakarta ini.

Kehadiran pemimpin di lapangan juga menjadi cara untuk membangun komunikasi dengan jajaran. Dengan melihat langsung proses pengawasan, seorang pemimpin dapat mengetahui apa yang berjalan baik, apa yang perlu diperbaiki, serta dukungan apa yang dibutuhkan tim.

Prinsip tersebut berjalan beriringan dengan

disiplin waktu yang ia pegang. Ketepatan waktu bukan sekadar persoalan hadir sesuai jadwal, tetapi merupakan bentuk komitmen terhadap pekerjaan dan penghargaan terhadap orang lain. Dalam kegiatan pengawasan yang membutuhkan kesiapsiagaan dan respons cepat, disiplin menjadi bagian penting dari profesionalisme.

Namun, disiplin tidak hanya dituntut dari bawahan. Sumono menempatkan keteladanan sebagai titik awal kepemimpinan. Seorang pemimpin harus terlebih dahulu memberikan contoh sebelum meminta jajaran mengikuti standar yang sama.

Prinsip berikutnya adalah kerja tim.

Dalam pengawasan sumber daya kelautan, tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja seorang diri. Di balik setiap kegiatan pengawasan terdapat banyak personel dengan peran masing-masing. Ada yang menyiapkan perencanaan, melakukan pengumpulan informasi, turun ke lapangan, melakukan pemeriksaan, menganalisis temuan, hingga memastikan tindak lanjut berjalan.

Karena itu, Sumono memandang keberhasilan sebagai keberhasilan tim. Setiap capaian

merupakan hasil kerja bersama dan harus dihargai sebagai buah kolaborasi seluruh jajaran.

Sebaliknya, ketika terjadi kegagalan, ia memegang prinsip yang berbeda:

“Keberhasilan adalah keberhasilan tim, tetapi kegagalan menjadi tanggung jawab pemimpin.”

Prinsip tersebut menggambarkan cara Sumono menempatkan dirinya sebagai pemimpin. Ia tidak ingin mengambil seluruh kredit ketika tim berhasil, tetapi juga tidak melemparkan kesalahan kepada anggota ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan.

Pemimpin harus berada di depan ketika mengambil keputusan dan berada paling depan ketika keputusan tersebut harus dipertanggungjawabkan.

Jejak kariernya sendiri menunjukkan proses panjang tersebut. Sebelum memimpin UPT, Sumono pernah menjabat Kepala Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Timur II sejak 2010 selama lebih dari dua tahun. Ia kemudian dipercaya sebagai Kepala Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Barat I pada 2013, sebelum memasuki fase kepemimpinan UPT.





Rangkaian penugasan tersebut memperlihatkan perjalanan karier yang bertahap: dari memahami teknis pengawasan, memimpin fungsi, kemudian memimpin organisasi di tingkat UPT, hingga akhirnya memimpin pengawasan sumber daya kelautan pada tingkat nasional.

Latar belakang pendidikannya juga memperlihatkan perpaduan antara kompetensi teknis dan pemahaman hukum. Ia merupakan lulusan Program Studi Penangkapan Ikan Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta pada 1997, kemudian menyelesaikan Sarjana Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di Universitas Satya Negara Indonesia pada 2006. Semangat memperdalam kapasitasnya berlanjut hingga meraih gelar Magister Ilmu Hukum dari Universitas Tanjungpura pada 2016.

Sumono juga terus memperkaya kapasitas melalui berbagai pendidikan dan pelatihan. Pada 2025, ia mengikuti PKN Tingkat II. Pengembangan kompetensinya mencakup bidang pemberantasan IUU Fishing, strategi penyidikan dan penuntutan tindak pidana kelautan dan perikanan, manajemen pengawasan berbasis risiko, pengawasan pemanfaatan laut, hingga pelayanan publik sistem pemantauan kapal perikanan.

Jejak tersebut memperlihatkan sosok birokrat yang terus belajar mengikuti kompleksitas tan-

tangan pengawasan. Namun, bagi Sumono, pengetahuan dan pengalaman tidak boleh berhenti sebagai teori. Semuanya harus bermuara pada kemampuan membaca persoalan, mengambil keputusan, dan memastikan pengawasan benar-benar hadir di lapangan.

Di balik jabatan dan panjang perjalanan kariernya, Sumono Darwinto merepresentasikan aparatur yang tumbuh dan ditempa dari lapangan. Pengalaman memimpin beberapa UPT di wilayah yang berbeda memberinya pemahaman bahwa setiap daerah memiliki karakter persoalan yang berbeda dan setiap kebijakan pada akhirnya harus dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata.

Karena itu, memimpin pengawasan sumber daya kelautan baginya bukan sekadar memberikan instruksi. Dibutuhkan kehadiran, ketegasan, disiplin, penguasaan persoalan, kemampuan membangun tim, keberanian mengambil keputusan, dan kesediaan untuk bertanggung jawab.

Kini, sebagai Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono membawa seluruh pengalaman tersebut ke tingkat yang lebih luas. Ia memimpin jajaran untuk memastikan sumber daya kelautan Indonesia dimanfaatkan secara bertanggung jawab, kepatuhan terus diperkuat, potensi pelanggaran dicegah dan ditindak, serta pengawasan dilaksanakan secara konsisten.

Perjalanan lebih dari 28 tahun bukan sekadar catatan masa pengabdian. Ia adalah proses panjang yang membentuk cara Sumono memimpin: disiplin dalam waktu, hadir di lapangan, bekerja bersama tim, tidak hanya mampu memerintah, serta berani memikul tanggung jawab.

Sebab bagi seorang pemimpin pengawasan, keberhasilan bukan miliknya seorang, melainkan milik seluruh tim. Tetapi ketika kegagalan terjadi, pemimpinlah yang pertama kali harus berdiri dan mempertanggungjawabkannya.

Dan dari sanalah, ketegasan seorang pemimpin menemukan maknanya: bukan sekadar mampu memberi perintah, tetapi mampu memberi teladan, hadir ketika dibutuhkan, dan bertanggung jawab atas amanah yang dipercayakan.

Daftar Pemenang

LOMBA SEMARAK KEMERDEKAAN

Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

81 INDONESIA
BERDAULAT
ADIL DAN
MAKMUR



LOMBA KREATIVITAS DAN SENI

- 1 **JUARA 1** Stasiun PSDKP Kupang
- 2 **JUARA 2** Pangkalan PSDKP Benoa
- 3 **JUARA 3** Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP



LOMBA DEKORASI

- 1 **JUARA 1** Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan
- 2 **JUARA 2** Pangkalan PSDKP Benoa
- 3 **JUARA 3** Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan



LOMBA MENULIS PERORANGAN

- 1 **JUARA 1** Sheriff - Direktorat Penanganan Pelanggaran
- 2 **JUARA 2** Riyan Maulana - Pangkalan PSDKP Tual
- 3 **JUARA 3** Satria Ramadhan - Pangkalan PSDKP Batam



LOMBA MENULIS UNIT KERJA

- 1 **JUARA 1** Pangkalan PSDKP Benoa
- 2 **JUARA 2** Direktorat Penanganan Pelanggaran
- 3 **JUARA 3** Pangkalan PSDKP Jakarta



LOMBA FOTO PERORANGAN

- 1 **JUARA 1** Suigit Duki Wibowo - KP Barracuda 01 Direktorat POA
- 2 **JUARA 2** Ferry Firdaus - Pangkalan PSDKP Lampulo
- 3 **JUARA 3** Noval Isro Mirando - Stasiun PSDKP Tarakan



LOMBA FOTO UNIT KERJA

- 1 **JUARA 1** Direktorat Pengendalian Operasi Armada
- 2 **JUARA 2** Pangkalan PSDKP Tual
- 3 **JUARA 3** Stasiun PSDKP Pontianak



LOMBA VIDEO PERORANGAN

- 1 **JUARA 1** Rizaldi Maslo Seay - Pangkalan PSDKP Tual
- 2 **JUARA 2** Achmad Fardiansyah Nasution - Stasiun PSDKP Belawan
- 3 **JUARA 3** Meisal Rachdiana - Pangkalan PSDKP Benoa



LOMBA VIDEO UNIT KERJA

- 1 **JUARA 1** Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan
- 2 **JUARA 2** Pangkalan PSDKP Lampulo
- 3 **JUARA 3** Pangkalan PSDKP Batam



LOMBA DESAIN GRAFIS PERORANGAN

- 1 **JUARA 1** Klanisia Galuh Rahma - Pangkalan PSDKP Jakarta
- 2 **JUARA 2** Rifki Ferdie Nursalam - Direktorat Pengendalian Operasi Armada
- 3 **JUARA 3** Achmad Fardiansyah Nasution - Stasiun PSDKP Belawan



LOMBA DESAIN GRAFIS UNIT KERJA

- 1 **JUARA 1** Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan
- 2 **JUARA 2** Direktorat Penanganan Pelanggaran
- 3 **JUARA 3** Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan



LOMBA TARIK TAMBANG VIRTUAL

- 1 **JUARA 1** Pangkalan PSDKP Tual
- 2 **JUARA 2** Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP
- 3 **JUARA 3** Stasiun PSDKP Kupang

*Semangat
Kebersamaan
Dalam Berkarya
untuk Negeri*



bit.ly/4cx1qgE

SCAN QR CODE ATAU KUNJUNGI LINK DIATAS UNTUK MELIHAT HASIL KARYA



Menabur

OLEH : **SAIFUL UMAM**
SESDITJEN PSDKP

Media sosial 'X' dua hari lalu diramaikan oleh warganet yang mengunggah video dari atas gedung seorang pria yang berjalan kaki, memakai baju putih celana hitam, sedang berjalan dengan hiruk pikuk kendaraan. tepatnya di atas jalan layang Casablanca di bawah terik matahari Jakarta.

Pemandangan yang tidak lazim, *flyover* yang hanya biasa dilalu-lintasi kendaraan bukan untuk pejalan kaki.

Unggahan tersebut memicu reaksi dan beragam komentar dari warganet, mayoritas merasa iba dan kasihan serta ungkapan simpati dan empati, diiringi dengan doa baik agar segera mendapatkan pekerjaan dan doa bagi semua orang yang berjuang di Jakarta ini.

Kebanyakan warganet menyimpulkan, kalo melihat penampilan atau baju yang dikenakan biasanya orang yang selesai melamar pekerjaan atau interviu kerja. Yang membaca tulisan ini saya yakin pernah memiliki memori masa lalu. Bagaimana Ketika menjalani fase-fase ketika sedang menjalani masa perjuangan dan sulit.

Ketika setelah wisuda bingung mau kemana, melamar pekerjaan ditolak, memasukkan lamaran namun tak kunjung dapat jawaban dan panggilan, meninggalkan kampung halaman tanpa tujuan untuk mendapat penghidupan dan pekerjaan yang layak, pertama kali tiba di Jakarta tanpa sanak saudara.

Atau saat ini, kita sedang mengalami kondisi yang kurang beruntung dan kondisi sulit, berhemat karena kebutuhan rumah tangga terus naik tanpa ada kenaikan penghasilan, UKT anak, merawat anak atau orang tua sakit yang harus ditanggung biayanya, pekerjaan menumpuk tak pernah selesai, tulang punggung keluarga terkena lay off, karier dikantor stagnan dan begini – begini saja.

Ya... itu merupakan fase kita memasuki musim menabur.

Kadang kondisi tersebut semakin terasa berat ketika melihat pencapaian orang lain yang sukses di sekitar kita, kok bisa hidupnya serba ada dan tercukupi, kariernya lancar tanpa hambatan, semua tercukupi dan apa yang dimau bisa dibeli, anak-anaknya sudah sukses.

Kita berpikir, kok mereka bisa menjalani hidup lancar-lancar saja, tidak ada hambatan atau masalah. Namun apa yang kita pikirkan itu belum tentu benar, mereka yang kamu bandingkan saat ini juga pernah mengalami fase-fase sulit, mereka juga pernah mengalami masa-masa yang saat ini anda alami.

Orang yang kamu bandingkan kesuksesannya saat ini, sedang menjalani musim tuai dari apa yang mereka sudah lama tabur.

Begitulah siklus hidup, ada musim tabur dan ada musim tuai, sudah hukum alam dua musim tidak mungkin bersamaan terjadi. atau tidak mungkin menabur langsung menuai.

Dalam kondisi bagaimanapun dan selagi masih muda dan produktif maka banyak-banyak menabur kebaikan, menabur pendidikan, menabur karya, menabur kerja, menabur pengalaman, menabur relasi dan menabur skill di tempat kerja saat ini, agar kelak nanti bisa menuai buahnya.

Percayalah waktunya pasti akan tiba.





LENSA
PSDKP



GROUND BREAKING PANGKALAN PSDKP BATAM



LENSA
PSDKP



**PENYEGARAN KEMAMPUAN TEKNIS MENEMBAK
AKN WILAYAH BARAT**



LENSA
PSDKP



PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA PSDKP DAN DKP PROV GORONTALO



LENSA
PSDKP



**KOORDINASI ANTARA DITJEN PSDKP
DAN BIRO KORWAS PPNS POLRI**



LENSA
PSDKP





LENSA
PSDKP



**PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN
FUNGSIONAL LINGKUP DITJEN PSDKP**

